



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "*good governance*" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan, penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kepada semua pihak yang berkepentingan.

Sumber daya tersebut di atas meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan Lakip Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, selanjutnya disebut Lakip, telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tanggal 20 November 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan surat Sekretariat Daerah Nomor : 060/051/I/2024/Org, tanggal 05 Januari 2024.

Lakip Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mencakup rencana dan realisasi pelaksanaan tugas maupun fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	6
D. Isu-Isu Strategis.....	31
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	36
B. Indikator Kinerja Utama.....	37
C. Rencana Kerja Tahunan.....	40
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	54
B. Analisis Capaian Kinerja.....	57
C. Realisasi Keuangan.....	83
BAB IV PENUTUP.....	93
LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat dan pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Proses penyusunan Laporan Kinerja yang dilakukan bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu sebagai instansi pemerintah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja untuk kedepannya. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Yaitu:
 1. Memberikan informasi tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.
 2. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.
 3. Menilai akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar kedepan.
 5. Sebagai acuan untuk menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun berikutnya.

Sementara itu LAKIP memiliki dua Fungsi utama, Pertama, Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja

kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai upaya memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua Fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal Perangkat Daerah, menjadikan LAKIP 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang diperoleh merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2024.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal Perangkat Daerah, menjadikan LAKIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bagi upaya perbaikan kinerja dimasa datang.

Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Kedudukan

Berdasarkan kebijakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik, sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian program dan kegiatan yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus sistem LAKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, secara selaras setiap tahunnya ditetapkan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan stratejik tersebut.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil dicapai. pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Tupoksi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut

- **Tugas Pokok**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

- **Fungsi**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait Tugas dan Fungsinya;

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, meliputi :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;

- 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Statistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Persandian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait Tugas dan Fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai Tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tugas.
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas.
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas.

- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- 5) Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya.
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan Tugas Dinas dengan instansi terkait.
- 7) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
- 8) menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- 9) merumuskan pedoman, petunjuk teknis, kebijakan dan pembinaan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- 10) menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian manfaat di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- 11) menyelenggarakan pembinaan pengembangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 12) menyelenggarakan perlindungan dan pengamanan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 13) mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 14) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- 15) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas

- dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 17) menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

B. SEKRETARIS

Sekretaris membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- 2) pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 3) pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- 4) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
- 5) pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 6) pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- 7) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja dinas; dan
- 8) pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sekretaris meliputi :

- 1) menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- 3) memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- 4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas;
- 7) melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 8) melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- 9) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
- 10) melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 11) melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- 12) mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;

- 13) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
 - 14) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 15) menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 2) melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Sekretaris membawahi tiga subbagian yaitu Subbagian Program, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, dan Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja. Uraian tugas subbagian Program meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f) menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;
- g) memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- h) menyusun program dan kegiatan dinas dalam dokumen perencanaan;
- i) menyusun dokumen evaluasi dinas;
- j) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dinas;
- k) melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang komunikasi, informatika;
- l) memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah di bidang komunikasi, Informatika, statistic dan persandian;
- m) mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi dinas;
- n) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- o) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- p) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g) melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h) melakukan pengelolaan aset, perlengkapan dan rumah tangga;
- i) mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j) melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k) melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l) melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m) melakukan peningkatan kapasitas sumber daya

- aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitas, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n) melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup dinas;
 - o) memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan;
 - p) memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - q) melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian;
 - r) melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup dinas;
 - s) melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup dinas;
 - t) memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
 - u) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - v) menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - w) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - z) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil Negara;
- g) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h) melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i) melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- j) menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- k) menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- l) menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;
- m) menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- n) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;

- o) menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik;
- 4) Pelaksanaan administrasi di Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyediaan informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, dan layanan informasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- g. menyusun perumusan kajian di bidang pengelolaan dan penyediaan informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, dan layanan informasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- h. menyusun dan merumuskan kajian dampak terhadap usaha dan/atau kegiatan;
- i. mengoordinasikan penyediaan konten informasi, media komunikasi, dan layanan informasi publik;
- j. mengoordinasikan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- k. mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang informasi dan komunikasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan sosialisasi pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi publik;

- m. melakukan layanan monitoring isu publik di media massa dan sosial;
- n. melakukan pengumpulan bahan informasi dari perangkat daerah instansi vertikal, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- o. melakukan pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat);
- p. melakukan pengolahan hasil pengumpulan pendapat umum;
- q. melakukan analisa data informasi untuk mendukung komunikasi publik lingkup nasional, provinsi dan daerah;
- r. melakukan pengumpulan tema komunikasi publik lingkup nasional, provinsi, dan daerah;
- s. melakukan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- t. melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- u. melakukan pembuatan konten lokal;
- v. melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
- w. melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non pemerintah daerah;
- x. melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- y. melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Daerah (Kelompok Informasi Masyarakat);
- z. melakukan layanan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- aa. melakukan pelayanan informasi publik untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- bb. melakukan pelayanan pengaduan masyarakat;
- cc. melakukan fasilitasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi perangkat daerah;
- dd. melakukan pengelolaan hubungan dengan media;
- ee. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik;
- ff. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- gg. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- hh. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Komunikasi Publik, serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ii. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA

Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Aplikasi dan Informatika. Adapun fungsinya sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatika,

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatika;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi dan informatika;
- 4) Pelaksanaan administrasi di bidang aplikasi dan informatika;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Aplikasi dan Informatika memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Aplikasi dan Informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatika;
- g. melaksanakan pelayanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
- h. melaksanakan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah dan layanan keamanan informasi *E-Government*;
- i. melaksanakan pelayanan manajemen data dan informasi *E-Government*;
- j. melaksanakan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik serta suplemen yang terintegrasi;
- k. melaksanakan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City*;

- l. melaksanakan pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- m. melaksanakan pelayanan nama domain dan subdomain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
- n. melakukan pendaftaran nama domain Pemerintah Daerah;
- o. melakukan penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- p. melakukan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
- q. melakukan penatalaksanaan dan pengawasan *E- Government* dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- r. melakukan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- s. mengelola pusat data pemerintahan daerah;
- t. melaksanakan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- u. mengoordinasikan dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
- v. mengoordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
- w. melakukan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- x. menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah;
- y. melakukan pengembangan dan pengolahan ekosistem kabupaten cerdas;
- z. melakukan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;

- aa. melakukan pengelolaan *Government Chief Information Officer*;
- bb. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang aplikasi dan informatika;
- cc. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- dd. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ff. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

E. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang statistik. Adapun fungsi dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang statistik;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang statistik;
- 4) Pelaksanaan administrasi di bidang statistik dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik mempunyai uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan

Tugas;

- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan di bidang statistik untuk pengamanan informasi;
- g. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistic.
- h. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan sumber visi di bidang statistic.
- i. melakukan pengumpulan, verifikasi dan pemutakhiran data pembangunan daerah.
- j. melakukan validasi data yang bersumber dari seluruh perangkat daerah, badan pusat statistik, dan instansi lainnya.
- k. menyusun dan memelihara statistik hasil-hasil Pembangunan.
- l. melakukan analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana Pembangunan.
- m. menyusun dan mempublikasikan data statistik daerah baik secara manual/dokumen maupun secara elektronik.
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang statistic.
- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Statistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. BIDANG PERSANDIAN

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang persandian. Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persandian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang persandian.

Bidang Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Persandian sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia

- sandi, pengelolaan perangkat lunak sandi, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;
- g. menyusun teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - h. menyusun teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - i. melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghancuran informasi berklasifikasi;
 - k. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
 - l. melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan seminar;
 - m. melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan seminar;
 - n. melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
 - o. melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
 - p. melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - q. melakukan penyusunan rencana kebutuhan unsur

- pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- r. merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - s. mengoordinasikan pelaksanaan hubungan komunikasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - t. melakukan pengamanan terhadap kegiatan, aset, fasilitas, instalasi penting, vital, kritis melalui kontra penginderaan dan metode pengamanan persandian lainnya;
 - u. melakukan pengamanan informasi elektronik;
 - v. melakukan pengelolaan *security operation center* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
 - w. melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
 - x. menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi, dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
 - y. melakukan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - z. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang persandian;

- aa. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- bb. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Persandian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- dd. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

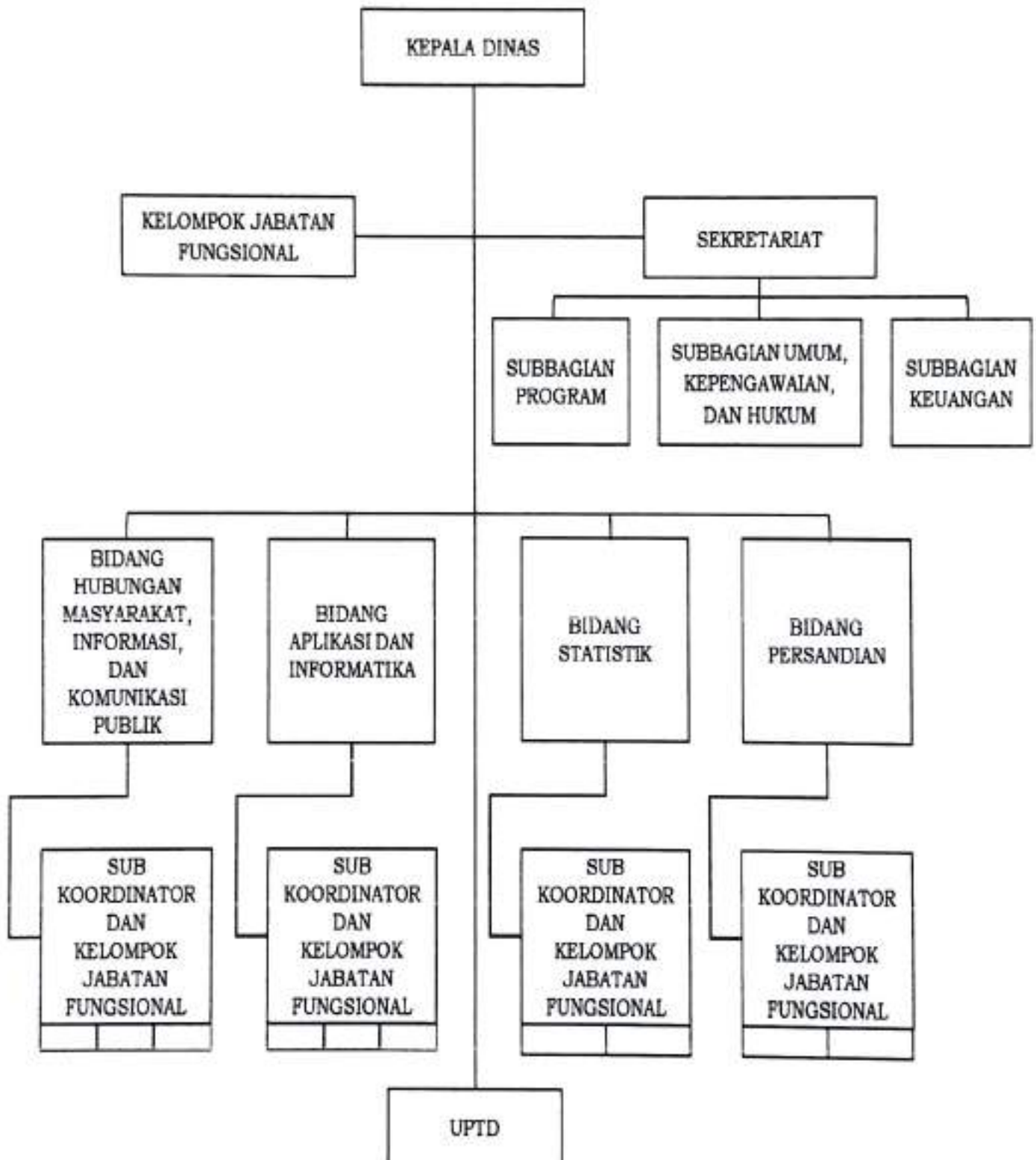
Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Tugas, maka pada masing-masing kelompok jabatan fungsional dapat membentuk Sub Koordinator. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang Tugas dan Fungsi jabatan administrator masing-masing.

Sub Koordinator melaksanakan Tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian Fungsi.

Sub Koordinator merupakan pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan Tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Koordinator ditunjuk dari Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan dapat ditunjuk Sub Koordinator dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang ahli pertama atau pelaksana senior di lingkup unit kerja jabatan pengawas yang disetarakan. Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau pelaksana senior, Sub Koordinator dapat merangkap tugas sebagai Sub Koordinator pada tugas sub substansi lain sesuai ruang lingkup unit kerja jabatan administrator atau koordinator.

Sub Koordinator memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan Tugas. Sub Koordinator ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB.

Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Kepulauan Selayar



D. ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada 5 tahun mendatang. Dalam rentang waktu 5 tahun ke depan, dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah :

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ; yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.

7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.

8. Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah yang menguasai teknologi informasi.

No	Nama/Nip	Pangkat/Gol.	Jabatan				Ket.
			JPT	Administrator	Pengawas	Pelaksana	
1	Hj. Andi Dwiyantri Musrifah, S.E.,M.M. 197605022014072002	Penata Tk.1, III/d	√				Plt. Kadis
2	Hj. Andi Dwiyantri Musrifah, S.E.,M.M. 197605022014072002	Penata Tk.1, III/d		√			Sekretaris
3	Mutmainnah, S.T 197810252007012020	Penata Tk.1, III/d			√		Kasubag
4	A.A.S. Rakhmat, S.Ap. 197509132007011013	Penata Muda Tk.1, III/b			√		Kasubag
5	Nita Sari, S.H. 198112142015032001	Penata, III/c			√		Kasubag
6	Mar'awati, S.Stp. 199408232016092001	Penata, III/c		√			Kabid
7	Andi Chitra Opu, S.Pd. 19730123200701015	Pembina Tk.1, IV/b		√			Kabid
8	A.Sandra Esty Abriani, S.E 198309232009032007	Penata, III/c		√			
9	Hasanuddin Hamid,ST,M.Han 19780412007011002	Penata Tk.1, III/d		√			
10	Nurwahidin, S.Sos 198308242015031003	Penata Muda Tk I, III/b			√		
11	Muhammad Alif, S.Kom 197505132009031003	Penata Tk.1, III/d			√		
12	Andi Afdal Absari, ST 198412042010011028	Penata, III/c			√		
13	Iswar Tita Adinata, S.Sos 198405052010011013	Penata, III/c			√		
14	Andi Jaelani S.P 196711151998031006	Penata Tk.1, III/d			√		
15	Hidayat, ST 197706122014071005	Penata Muda III/a			√		
16	Zaenal Arisin, S.Kom				√		PPPK
17	Yusniati, S.IP.MPA. 198506222011012016	Penata Tk.1, III/d			√		
18	Ira, S.P.,M.M. 198502252008012010	Penata Muda Tk I, III/b			√		
19	Suhrawardi 198007022008011015	Pengatur Tk.1, IId				√	
20	Asmin Salmin, S.Ag 197201262007011010	Penata, III/c				√	
21	Andi Marwiyah, S.Si,M.M 196903221997032008	Pembina, IV/a				√	
22	Firman 19770032007011016	Penata Muda/ IIla				√	
23	Ridwan 196909262007011019	Penata Muda/ IIla				√	

24	Mahmulianto, S.Kom					√	PPPK
25	Henl Anggriati Abd. Rasyid 198612092014072003	Pengatur Muda Tk I, II/b				√	
26	Abdul Rachman Azis 19720113199031005	Penata, III/c				√	
27	Nur Jennah 197806052007012032	Penata Muda/ IIa				√	
Jumlah			1	5	12	9	

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dilihat dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar data Januari s/ d Desember 2024 sebanyak 26 orang. Bila dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bila dilihat dari Kuantitas PNS pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian cukup memadai, namun bila dilihat dari tingkat kompetensinya masih jauh dari harapan, terutama dalam hal disiplin ilmu dan etos kerja.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah (Unit)	Ket
1.	Gedung Kantor	1	
2.	Sepeda Motor	13	
3.	Lemari Besi	1	
4.	Lemari Buku Arsip	1	

5.	Kursi Rapat	1	
6.	Kursi Tamu	4	
7.	Meja Kerja	6	
8.	Kursi Kerja	5	
9.	Lemari Es	1	
10.	AC Unit	8	
11.	Televisi	1	
12.	P.C Unit/Komputer PC	6	
13.	Lap Top	14	
14.	Printer	12	
15.	Mobil Jabatan	2	
16.	Mobil Operasional	1	
17.	Kursi Putar	4	
18.	Meja Rapat	1	
19.	Kamera	3	
20.	Note Book	2	
21.	Alat Rumah Tangga lain-lain	8	
22.	Tripod	1	
23.	Megaphone	1	
24.	Papan Visual/Papan Nama	1	
25.	Alat Studio Lainnya/Drone	1	

26.	Lensa kamera	2	
27.	Alat Komunikasi Radio	3	

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Perangkat Daerah yang baru terbentuk pada akhir Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020, dan mulai dijalankan pada Tahun 2021.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan.

Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu yang meliputi penetapan kebijakan dan program dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan faktor-faktor lainnya.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Digitalisasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Didesentralisasikan ke Kabupaten		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Digitalisasi Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan	30 %	50 %	70 %	90 %	90 %

		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada setiap urusan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan	30 %	50 %	70 %	90 %	90 %
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	2,3	2,6	2,8	3,0	3,5
		Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain, Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	50 %	50 %	70 %	90 %	90 %
		Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %
		Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat II	Tingkat II	Tingkat III
3.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC	B	BB	BB	A
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	CC	B	BB	BB	A
			Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	CC	B	BB	BB	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfo-SP	70	72,50	80	85	85

B. Indikator Kinerja Utama

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perangkat daerah dan Keputusan Bupati Kepulauan selayar Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan indikator kinerja utama dengan keputusan Kepala Dinas KominfoSP Nomor : 18/VI/2023, Tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut :

Tabel 1

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Setiap Urusan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan	Jumlah PD yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan public pada setiap urusan pemerintahan x 100 Jumlah PD	Persen	70 %
2.	Meningkatnya tingkat Kematangan Domain, Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Indeks SPBE	Hasil Evaluasi SPBE	Nilai	2,8
3.	Meningkatnya Pengolahan Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Data Statistik Sektoral yang sesuai Prinsip Satu Data Indonesiax 100 Jumlah Data Statistik Sektoral	Persen	80 %
4.	Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Penerapan KAMI berdasarkan kriteria SNI ICO/IEC 27001	Peringkat	Tingkat II
5.	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP	Predikat AKIP	Predikat	BB

		- Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Opini / Predikat SAP	Predikat	BB
		- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DiskominfoSP	Hasil Survey Responden	Nilai	80

C. Rencana Kerja Tahunan

Tahun Anggaran 2024, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan 5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 44 (Empat Puluh Empat) sub kegiatan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Layanan Hubungan Media
 - Kemitraan dengan Pemangku kepentingan

- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2. Program Aplikasi Informatika
- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - b. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Pengelolaan pusat Data Pemerintah
 - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- a. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor
 - Membangun Metadata Statistik Sektor
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, Dinas KominfoSP memperoleh pagu anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 4.063.862.000,- (Empat Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

D. Perjanjian Kinerja 2024

Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Bupati Kepulauan Selayar ditetapkan, sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target			
					2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Setiap Urusan Pemerintahan	%	30 %	50 %	70 %	90 %	90 %
2.	Meningkatnya Tingkat Kematangan, Domain, Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	50 %	50 %	70 %	90 %	90 %
3.	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	%	50 %	75 %	80 %	85 %	90 %
4.	Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai	Tingkat II	Tingkat II	Tingkat II	Tingkat II	Tingkat III
5.	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	BB	BB	A
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Nilai	CC	B	BB	BB	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Diskominfo-SP	Nilai	70 %	72,50 %	80 %	85 %	85 %

Jumlah Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2024 adalah Rp.4.603.862.000,- (Empat Miliar Enam Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Puluh Dua Rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 3.227.240.250,-
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 700.089.000,-
3. Program Aplikasi Informatika Rp. 366.024.300,-
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp. 123.815.950,-
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Rp. 186.692.500,-

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.603.862.000
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.227.240.250
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Diselesaikan Tepat Waktu		16.867.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.890.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.891.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.275.300
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.851.400

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2.103.300
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.855.500
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Pengelolaan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	2.570.246.800
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	2.777.667.850
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	4.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.333.200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.471.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	3.000.000
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	170.929.700
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.825.200

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3 167 500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	148.937.000
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	147.731.500
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.676.000
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	54.120.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	90.935.500
V	Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100	100.240.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	41.130.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	49.050.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.960.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	6.100.000

B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah yang berkualitas	100	700.089.000
I	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Komunikasi Publik yang Dikelola	100	700.089.000
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan aspirasi Publik	1 Dokumen	14.602.000
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	21.332.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	405.000.000
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	194.842.000
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	7 Layanan	9.760.000
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	27.234.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	43.651.000
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Terintegrasi	100	366.024.300
I	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain yang Dikelola Pemerintah	100	82.899.600

	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	1 Domain	27.899.600
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1.159.000
II	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola	100	283.696.600
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	88.206.900
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	23.514.000
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	0
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	134.153.700
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	1 unit	38.095.000
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Persentase Data Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu	100	123.815.950

	Data Indonesia		
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	38 OPD
			123.815.950
			123.815.950
			54.147.100
			32.551.100
			37.117.750

E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				186.692.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				186.692.500
I	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				107.435.800
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	10.435.800
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 Laporan	56.695.800
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			1 Laporan	21.692.100
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 OPD	18.512.800
I	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				79.356.000
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 OPD	79.356.000

**Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian 2025**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan cara untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran atau target kinerja yang ditentukan dalam perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Tabel 1
CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Setiap Urusan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan public pada setiap urusan pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan public pada setiap urusan pemerintahanx 100 Jumlah Perangkat Daerah	Persen	70 %	100 %
2.	Meningkatnya tingkat kematangan domain, kebijakan, tata Kelola, manajemen dan layanan SPBE	Persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah perangkat daerah yang menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronikx 100 Jumlah Perangkat Daerah	Persentase	70 %	100 %
3.	Meningkatnya pengelolaan data statistic sektoral	Persentase data statistic sektoral yang sesuai prinsip satu data Indonesia	Jumlah data statistic sektoral yang sesuai prinsip satu data Indonesiax 100 Jumlah data statistic sektoral	Persen	80 %	21,39 %
4.	Meningkatnya penerapan keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks keamanan informasi pemerintah daerah	Pencerapan KAMI berdasarkan kriteria SNI ICO/IEC 27001	Peringkat	Tingkat II	Tingkat III
5.	Meningkatnya kepercayaan	- Nilai SAKIP	Nilai/ Predikat AKIP	Nilai	BB	C

	Masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah	- Laporan Keuangan sesuai SAP	Opini/ Predikat SAP	Nilai	BB	-
		Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Diskominfo				80,85

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024, serta dengan merujuk pada hasil pelaksanaan program/ kegiatan selama tahun bersangkutan, capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat digambarkan, sebagai berikut :

Untuk melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 5.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Tabel 6

Tabel Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
A	Digitalisasi Penyelenggaraan seluruh Urusan Pemerintahan yang didesentralisasikan ke Kabupaten				
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Digitalisasi Perangkat Daerah Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan	70 %	100 %	$= \frac{100 \times 100}{70}$ $= 142,8$	Diskominfo SP (Bidang Humas)
2	Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan	70 %	100 %	$= \frac{100 \times 100}{70}$ $= 142,8$	Diskominfo SP (Bidang Humas)

Tujuan 1. Digitalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang didesentralisasikan ke Kabupaten dengan Indikator Persentase pemenuhan Kebutuhan Digitalisasi Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yaitu Perangkat daerah yang mampu menerapkan proses digitalisasi pelayanan public ditargetkan 70 % dengan capaian 100 %, Dimana semua perangkat daerah telah menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik sebagai salah satu bentuk digitalisasi pelayanan dari tanda tangan manual ke tanda tangan melalui aplikasi sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah.

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan dengan target 70 %, terealisasi 100 % yaitu semua perangkat daerah telah menggunakan tanda tangan elektronik sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan public, Aplikasi SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat) di Dinas KominfoSP terkait layanan aduan online yang bisa diakses semua Masyarakat untuk kemudian oleh DiskominfoSP ditindaklanjuti ke Perangkat Daerah terkait, Aplikasi OSS (One Single Service) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait Pelayanan Penerbitan Izin secara Online, LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dikelola Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah terkait Pelayanan Pengadaan barang dan jasa secara online, aplikasi SIPATUO (Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait Pelayanan Informasi tentang perizinan, Peta Bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Sistem informasi Masyarakat untuk mengetahui sebaran daerah rawan bencana, Aplikasi Antrian Online di Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih mudah kepada Masyarakat, JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah aplikasi yang dikelola oleh

Bagian Hukum Sekretariat Daerah terkait data Regulasi, Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
B	Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
1	Indeks SPBE	2,8	2,57	$= \frac{2,57}{2,8} \times 100$ = 91,78	Diskominfo SP (Bidang Aptika)
2	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	70 %	100 %	$= \frac{100}{70} \times 100$ = 142,8	Diskominfo SP (Bidang Aptika)
3	Persentase Data Statistik Sektorial yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	80 %	21,39 %	$= \frac{21,39}{80} \times 100$ = 26,73 %	Diskominfo SP (Bidang Statistik)
4	Indeks Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	II	III	100 %	Diskominfo SP (Bidang Persandian)

Tujuan 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Indikator Indeks SPBE dengan target 2,8 Pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nilai Indeks SPBE 2,57. Nilai Indeks SPBE berdasarkan penilaian kebijakan informasi terkait tata Kelola SPBE, Layanan Publik Berbasis Elektronik, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Audit TIK, Penerapan manajemen SPBE, Penyelenggara SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perencanaan Strategis SPBE.

Sasaran 2. Meningkatnya Tingkat kematangan Domain, Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE, dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target 70 % terealisasi 100 % yaitu semua perangkat daerah telah menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronik mulai dari penyusunan rencana kerja kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran melalui aplikasi SIPD, penginputan Realisasi anggaran, Evaluasi Renja dan Renstra di aplikasi MANCA.

Sasaran 3. Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan Indikator Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia dengan target 80 % dan terealisasi 21,39 % yaitu terdapat 46 Data statistic sectoral yang sesuai prinsip satu data Indonesia dari 215 data statistic sectoral.

Sasaran 4. Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan target Tingkat II dan terealisasi Tingkat III s/d V atau senilai 684, yaitu bahwa dari 7 Tingkat kelengkapan penerapan standar ISO27001 sesuai kategori hanya terdapat 7 kategori yang dinilai yaitu Tata Kelola dengan nilai 65, Pengelolaan Resiko dengan nilai 70, Kerangka Kerja Keamanan Informasi dengan nilai 180, Pengelolaan Aset dengan nilai 147, Teknologi Keamanan Informasi dengan nilai 165, Perlindungan Data Pribadi dengan Nilai 57 dan Pengamanan Keterlibatan Pihak ketiga dengan Nilai 100.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
C	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	-		Diskominfo SP (Sekretariat)
2	Nilai SAKIP	BB	C		Diskominfo SP (Sekretariat)
3	Laporan Keuangan sesuai SAP	BB	-		Diskominfo SP (Sekretariat)
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DiskominfoSP	80	80,85	$= \frac{80,85 \times 100}{80}$ $= 101,06$	Diskominfo SP (Sekretariat)

Tujuan 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target B, terealisasi

Sasaran 5. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah dengan Indikator : 1. Nilai SAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2023 adalah 60 (C) sedangkan untuk dokumen 2024 belum ada penilaian dari Inspektorat, 2. Laporan Keuangan sesuai SAP, 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DiskominfoSP untuk Tahun 2024 senilai 80,85. Kualitas Layanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilihat dari nilai konversi mutu layanan dengan 9 unsur layanan yakni :

Unsur Layanan	Nilai Konversi IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
Persyaratan	82,50	B	Baik
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	78,75	B	Baik
Waktu Penyelesaian	78,75	B	Baik
Biaya/Tarif	93,75	A	Sangat Baik
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	80,00	B	Baik
Kompetensi Pelaksana	80,00	B	Baik
Perilaku Pelaksana	82,50	B	Baik
Sarana dan Prasarana	78,75	B	Baik
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	80,00	B	Baik
Nilai IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	80,85	B	Baik

Tabel 7

Capaian Kinerja berdasarkan Urusan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
A	Urusan Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas	100	100	$= \frac{100}{100} \times 100$ $= 100 \%$	Diskominfo SP (Bidang Humas)
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	$= \frac{100}{100} \times 100$ $= 100 \%$	Diskominfo SP (Bidang Aptika)

Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas ditargetkan 100 % dengan capaian Tahun 2024 adalah 100 %. Target tercapai karena terdapat 7 layanan system informasi dari 7 layanan yang ditargetkan, yaitu (Youtube (kominfo selayar), Facebook (@kepulauan_selayar), Instagram (@kepulauan_selayar), Website (www.kepulauanselayar.go.id), Twitter (@kep_selayar), Tiktok (@humas.selayar), Snackvideo (humaskominfose).

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2024 tercapai 100 % dari target 100 %. Target tercapai karena pada Tahun 2024 terdapat 18 layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dari 18 Layanan Publik yang dilaksanakan yaitu :

1. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dikelola Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Alamat <http://lpse.kepulauanselayarkab.go.id/eproc4>.
2. OSS (One Single Service) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Alamat <https://pmptsptk.kepulauanselayarkab.go.id/index.php/oss-republik-indonesia>.
3. SIPATUO (Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online) melalui APK Android dan dapat di download melalui Playstore merupakan Sebuah Aplikasi Android untuk mengajukan permohonan perizinan secara online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Peta bencana dengan alamat <https://bpbk.kepulauanselayarkab.go.id/peta/> merupakan Sistem Informasi bagi masyarakat untuk mengetahui sebaran daerah rawan bencana di kepulauan Selayar;
5. SIMDA Keuangan dengan Alamat <http://simda.kepulauanselayarkab.go.id/#/>.

6. Siladus Inspektorat (Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat) dengan Alamat <https://siladus.kepulauanselayarkab.go.id/>
7. Epusda (Elektronik Perpustakaan daerah) merupakan Layanan Perpustakaan Elektronik milik Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat di download langsung melalui Playstore.
8. TEMANKU (Sistem informasi layanan kepegawaian terpadu), merupakan Layanan Kepegawaian yang disediakan oleh BKD Kepulauan Selayar yang dapat di akses melalui aplikasi Android yang dapat di download melalui Playstore.
9. Registrasi Rawat jalan online RSUD KH Hayyung yang dapat di download melalui playstore.
10. Antrian Online dan Kepuasan Masyarakat Puskesmas Benteng, yang merupakan aplikasi antrian rawat jalan yang disediakan oleh Puskesmas Benteng dalam bentuk aplikasi Android yang dapat di download melalui Playstore
11. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dengan Alamat <https://jdih.kepulauanselayarkab.go.id/public/>
12. SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar) dapat diakses pada alamat <http://simpeg.kepulauanselayarkab.go.id/login.php>
13. E-Kinerja dapat diakses pada alamat <http://ekinerja.kepulauanselayarkab.go.id/login.php>
14. APEL (Absensi Pegawai Online) merupakan Aplikasi Absensi Pegawai Online yang dikelola oleh pihak BKD Kepulauan Selayar dan dapat di akses pada alamat <http://bkd.kepulauanselayarkab.go.id/apel/login.php>.

15. PPID merupakan website yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi publik Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar dan dapat diakses pada alamat <https://ppid.kepulauanselayarkab.go.id/>
16. SIMPELNAKER (Sistem Informasi Perlindungan Tenaga Kerja) dengan alamat <https://simpelnaker.kepulauanselayarkab.go.id/>
17. Layanan Pengaduan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara online yang dapat diakses melalui <https://www.lapor.go.id/>.
18. TTE (Sistem Tanda Tangan Elektronik) yang diakses melalui alamat <http://tte.kepulauanselayarkab.go.id/>.

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
B	Urusan Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	38	38	$= \frac{38 \text{ OPD}}{38 \text{ OPD}} \times 100$ $= 100$	Diskominfo SP (Bidang Statistik)
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	38	38	$= \frac{38 \text{ OPD}}{38 \text{ OPD}} \times 100$ $= 100$	Diskominfo SP (Bidang Statistik)

Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 adalah 38 Perangkat Daerah atau tercapai 100 % disebabkan karena semua OPD telah menggunakan data statistic dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kegiatan Tahun berikutnya.

Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2024 adalah 38 Perangkat Daerah atau tercapai 100 % karena semua OPD telah menggunakan data statistik dalam Menyusun Laporan Evaluasi seperti LAKIP dan LPPD.

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
C	Urusan Persandian				
1	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah	100	100	$= \frac{100}{100} \times 100$ $= 100$	Diskominfo SP (Bidang Persandian)

Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Tahun 2024 dari target 100 % tercapai 100 % karena Tahun 2024 terdapat 28 Sistem elektronik yang di Assesment/Audit dari 28 Sistem elektronik yang aktif :

1. bpbd.kepulauanselayarkab.go.id
2. putr.kepulauanselayarkab.go.id
3. Patroltaru.kepulauanselayarkab.go.id
4. Inspektorat.kepulauanselayarkab.go.id
5. Siladus.kepulauanselayarkab.go.id
6. perputakaan.kepulauanselayarkab.go.id
7. bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
8. bappelitbangda.kepulauanselayarkab.go.id
9. dinsos.kepulauanselayarkab.go.id
10. dikbud.kepulauanselayarkab.go.id
11. silajara.kepulauanselayarkab.go.id
12. lpse.kepulauanselayarkab.go.id
13. bkd.kepulauanselayarkab.go.id
14. apel.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
15. pangkat.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
16. satya.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
17. pengaduan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
18. simpole.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
19. sipeka.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
20. tubel.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
21. simpeg.kepulauanselayarkab.go.id
22. ekinerja.kepulauanselayarkab.go.id
23. dilan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
24. jdih.kepulauanselayarkab.go.id
25. pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id
26. itourism.pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id
27. sibija.kepulauanselayarkab.go.id
28. dinkes.kepulauanselayarkab.go.id

2.1. CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN/OUTPUT (Permendagri 18 Tahun 2020)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
		352 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo x 100 Jumlah Perangkat Daerah	26x 100 38	68,42	Bidang Aptika	Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Diskominfo-SP sebanyak 26 Perangkat Daerah
		353 Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo x 100 Jumlah Perangkat Daerah	26x 100 38	68,42		Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas KominfoSP sebanyak 28 Perangkat Daerah
		354 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (ya atau tidak)		ya		Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo-SP adalah TTE (Tanda Tangan Elektronik)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi dengan PM Kominfo No. 5/2015	Jumlah Kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan public pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi dengan PM Kominfo No. 5/2015x 100	24x 100 24	100 %	Bidang Aptika	Terdapat 24 Permintaan Fasilitas Zoom Meeting Tahun 2023 (Terlaksana)
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standarx 100	11x 100 38	28,94 %	Bidang Aptika	- Data Terlampir
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undanganx 100	11x 100 37	28,94 %	Bidang Aptika	- Data Terlampir
		Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang telah Tercantum dalam Dokumen Proses Bisnis yang Telah Diimplementasikan Secara Elektronikx 100	2x 100 11	9,09 %	Bidang Aptika	Tanda Tangan Elektronik dan SP4N LAPOR!

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		359 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik x 100 Jumlah Layanan	2x100 11	9,09 %	Bidang Aptika	Tanda Tangan Elektronik dan Email Sanapati
		360 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan x100 Jumlah Sistem Elektronik	2x100 30	6,66 %	Bidang Aptika	Tanda Tangan Elektronik dan Email Sanapati
		361 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan	Jumlah Layanan Publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahanx100 Jumlah Layanan Publik dan layanan administrasi	22x100 22	100 %	Bidang Aptika	Data Terlampir
		362 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan layanan pusat data pemerintahan x 100 Jumlah Perangkat Daerah	38x100 38	100 %	Bidang Statistik	Semua OPD
		363 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintahan x 100 Jumlah Perangkat Daerah	38x100 38	100 %	Bidang Statistik	Semua OPD

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		364 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui data sesuai siklus jenis data x 100 Jumlah Perangkat Daerah	38x100 38	100 %	Bidang Statistik	Semua OPD
		365 Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki system Elektronikx 100 Jumlah Perangkat Daerah	11x 100 38	28,94 %	Bidang Aptika	Data Terlapir
		366 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah OPD yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city X 100 Jumlah Semua OPD	7x100 37	18,91 %	Bidang Aptika	Data terlampir
		367 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN yang bersertifikatx 100 Jumlah ASN DiskominfoSP	0x100 27	0 %	Bidang Aptika	-
		368 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	-	-	-	-	Tahun 2024 Tidak ada Perda atau Perbup terkait implementasi e-government
		369 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Jumlah mitra strategisx 100 Jumlah keseluruhan mitra	24x100 24	100 %	Bidang Humas	Terdapat 24 Media sebagai mitra strategis yang diajak bekerjasama dalam penyebarluasan informasi

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		370	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah Konten Informasix100 Target Konten 2024	38,66 %	Bidang Humas	Data Terlampir
		371	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOPx100 Jumlah Diseminasi dan Layanan Informasi Publik	100 %	Bidang Humas	Data Terlampir

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	PERSANDIAN						
		417	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah Kegiatan Strategis yang Teramankanx 100 Jumlah Kegiatan Strategis yang Ada	683x100 683	100 %	Bidang Persandian
							Terdapat 683 Kegiatan Strategis yang teramankan dari 683 Kegiatan Strategis

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kund	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		418 Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah Sistem Elektronik yang Menerapkan SMKI dan Diamankan Sertifikat Elektronik atau Aplikasi Penyandianx 100 Jumlah Sistem Elektronik yang Ada	2x100 26	7,69 %	Bidang Persandian	Email SANAPATI https://mail.sanagati.net/gwa http://tte.kepulauanelayarkab.go.id /
		419 Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang telah Diaudit Resiko Kategori Rendah X 100 Jumlah Sistem Elektronik yang Ada	26x100 26	100 %	Bidang Persandian	Data Terlampir
		420 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankanx100 Jumlah titik PHKS	38x100 38	100 %	Bidang Persandian	Terdapat 38 Titik diamankan di 38 Perangkat Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	STATISTIK						
	Belum Ada	410 Tersedianya buku profil daerah			Belum Ada		Tidak dianggarkan
	Belum Ada	411 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1	1	Bappelitbangda	Survey Indeks Kesalehan Sosial
		412 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	23 kompilasi	23 kompilasi	OPD/Instansi Vertikal	Data Terlampir
		413 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	1	Bappelitbangda	Survey Indeks Kesalehan Sosial Rekomendasi BPS : B-230/BPS/7301 / 01/09/2022
		414 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	-	Belum Ada	-	Masih dalam tahap pendataan
		415 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoralx 100% Jumlah kegiatan statistik sektoral	11x100 37	29,73 %	Perangkat Daerah	Data Terlampir
		416 Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Jumlah metadata indikator statistik sektoralx100% Jumlah indikator statistik sektoral	107x100 107	100 %	Perangkat Daerah	Data Terlampir

1.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome (Permendagri 18 Tahun 2020)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Komunikasi dan Informatika						
		71 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo x 100% 38	26 x 100 38	68,42 %	Bidang Aptika	Data Terlampir
		72 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi x 100% Jumlah Layanan Publik	12 x 100 12	100 %	Bidang Aptika	Data Terlampir
		73 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi dan program publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota x 100% Jumlah penduduk	98.605 x 100 143.096	68,90 %	Data dari Disdukcapil	Jumlah Masyarakat Usia 14-64 Tahun

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persandian	Tingkat keamanan pemerintah	Informasi	684x 100 918	74,50 %	Bidang Persandian	Indeks KAMI Terlampir
			Jumlah nilai per area keamanan informasi x 100% Jumlah area penilaian				

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah x 100% Jumlah OPD	38 OPDx 100 38 OPD	100 %	Bidang Statistik	Semua OPD
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah x 100% Jumlah OPD	38 OPDx 100 38 OPD	100 %	Bidang Statistik	Semua OPD

2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Permendagri 18 Tahun 2020)

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data	Keterangan
1	Transparansi dan Partisipasi Publik						
	18.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- X 100% total jumlah dokumen yang telah dirinci	120 ----- X 100 120	100 %	Kepulauan selayarkab. go.id	Data Terlampir

C. Realisasi Keuangan

No	OPD	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan					Target		Realisasi		Permasalahan	Pemecahan Masalah
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100	4.613.862.000	95,29	4.384.875.585		
		2.16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/MOTA	Persentase Capaian Kinerja	70,5					
		2.16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	86		95,29			
		2.16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	16.867.000	100	70.880.000		
		2.16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3.890.510	3	3.089.808		
		2.16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.891.000	1	1.864.000		
		2.16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.000.000	1	1.474.400		
		2.16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	2.275.000	1	2.233.000		
		2.16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1.651.400	1	1.244.900		

		2.16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.303.300	1 Laporan	1.725.100		
		2.16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.855.500	2 Laporan	2.622.800		
		2.16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Pengelolaan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	2.791.472.050	94,66	2.639.377.924		
		2.16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	2.777.667.850	27 Orang	2.628.490.824		
		2.16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.208.960		
		2.16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.333.200	1 Laporan	2.663.000		
		2.16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.671.800	12 Laporan	2.677.100		
		2.16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	12 Laporan	3.800.000	12 Laporan	2.537.900		

		2.16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	170.929.100	98,84	168.955.351		
		2.16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.825.230	1 Paket	17.209.104		
		2.16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Teras	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Teras	1 Laporan	3.162.536	1 Laporan	2.737.036		
		2.16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	148.937.800	120 laporan	148.909.267		
		2.16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	142.733.560	87,62	125.447.290		
		2.16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.676.000	1 Laporan	1.527.200		
		2.16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	54.320.800	1 Laporan	42.034.960		
		2.16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	90.935.590	1 Laporan	85.883.100		
		2.16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	160.240.000	97,79	98.825.000		
		2.16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	43.130.000	1 Unit	40.005.000		
		2.16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perawatannya	10 Unit	49.050.000	10 Unit	47.870.000		

	2.16	01	2.09	0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	3.960.000	5 Unit	3.950.000		
	2.16	01	2.09	0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	5 unit	6.100.000	5 unit	6.100.000		
	2.16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pemertanian Layanan Sistem Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah yang berkualitas	100 %	700.809.800	99,42	695.998.300		
	2.16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemertanian Informasi Komunikasi Publik yang Berkelas	100 %	700.089.000	99,42	695.998.300		
	2.16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan aspirasi Publik	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.372.000		
	2.16	02	2.01	0004	Pengelolaan Kantor dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kantor dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	14.602.000	1 Dokumen	14.654.000		
	2.16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	405.000.000	1 Dokumen	404.191.200		
	2.16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	194.842.000	1 Dokumen	288.733.200		
	2.16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan Media	9.740.000	1 Layanan Media	17.010.000		
	2.16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	27.254.000	1 Dokumen	30.082.800		
	2.16	02	2.01	0008	Pengembangan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendukung/memfasilitasi Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	43.451.000	1 Dokumen	43.382.200		

		2.16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang Diintegrasikan Secara Online dan Terintegrasi	100 %	366.824.300	94,87	347.237.800		
		2.16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain yang Dikelola Pemerintah	100 %	82.054.700	91,40	75.082.080		
						Pendaftaran dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatakelolaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	1 Dokumen	27.899.800	1 Dokumen	26.274.900		
		2.16	03	2.01	0002	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	1 Unit	54.305.100	1 Unit	48.727.100		
		2.16	03	2.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terkalisasi	100 %	282.969.600	94	272.235.000		
		2.16	03	2.02	0001	Penatakelolaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatakelolaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	88.206.900	1 Dokumen	84.354.000		
		2.16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	23.516.000	1 Dokumen	22.871.000		

		2.21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
		2.21	02				PROGRAM PENDELENGKAPAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			100 %	184.692.590	92,66		172.993.600			
		2.21	02	2.01			Penyelenggaraan Persediaan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100 %	187.336.500	94,90		181.857.800			
		2.21	02	2.01	0001		Prinsip dan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	18.435.800	1 Dokumen		10.318.400			
		2.21	02	2.01	0002		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	56.695.800	1 Dokumen		56.361.300			
		2.21	02	2.01	0003		Pelaksanaan Keamanan Informasi: Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 Dokumen	1 Dokumen	21.692.100	1 Dokumen		16.774.500			
		2.21	02	2.01	0004		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi: Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	18.532.800	1 Perangkat Daerah		18.412.800			

		2.21	02	2.02		Pendiripan Pada Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengiriman Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	100 %	79.354.000	89,63	71.026.400		
		2.21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	79.354.000	33 Perangkat Daerah	71.026.400		

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 sebesar Rp. 4.386.875.585,- atau terserap 93,59% dari Total Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.603.862.000,-. Uraian Realisasi Urusan dan Program sebagai berikut :

19. Penyerapan anggaran per Urusan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Urusan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	4.293.353.550	4.093.154.885	95,34	216.986.415
2.	Urusan Bidang Statistik	123.815.950	120.727.100	97,51	3.088.850
3.	Urusan Bidang Persandian	186.692.500	172.993.600	92,66	13.698.900
TOTAL		4.603.862.000	4.386.875.585	95,29	216.989.415

20. Penyerapan anggaran per program

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.227.240.250	3.055.589.655	94,68	177.320.695
2.	Informasi dan Komunikasi Publik	700.089.000	695.998.300	99,42	4.090.700
3.	Aplikasi Informatika	366.024.300	347.237.030	94,87	18.787.270
4.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	123.815.950	120.727.100	97,50	3.088.850

5.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	186.692.500	172.993.600	92,66	13.698.900
TOTAL		4.603.862.000	4.386.875.585	95,29	216.986.415

21. Penyerapan Anggaran per jenis Belanja

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Belanja Pegawai	2.777.667.580	2.628.490.824	94,63	149.177.026
2.	Belanja Barang	1.752.194.150	1.688.234.761	96,35	63.959.389
3.	Belanja Modal	122.124.000	118.994.000	99,71	3.130.000

Dari table tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa anggaran yang tersedia (DPA) untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian tahun 2024 ini sebesar Rp. 4.603.862.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Realisasi sampai dengan Desember sebesar Rp. 4.386.875.585,- (Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan jika dipersentasekan mencapai 95,29 %. Berdasarkan Tabel di atas terkait realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu satu tahun dapat disampaikan bahwa dari lima (5) program, sebelas (11) kegiatan dan Empat puluh Lima (45) sub kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 95,29% artinya target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesungguhnya merupakan dokumen evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Dari keseluruhan target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 95,29%. Demikian LAKIP Perangkat Daerah ini disusun sebagai bahan tindak lanjut seperlunya.

Benteng, 5 Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

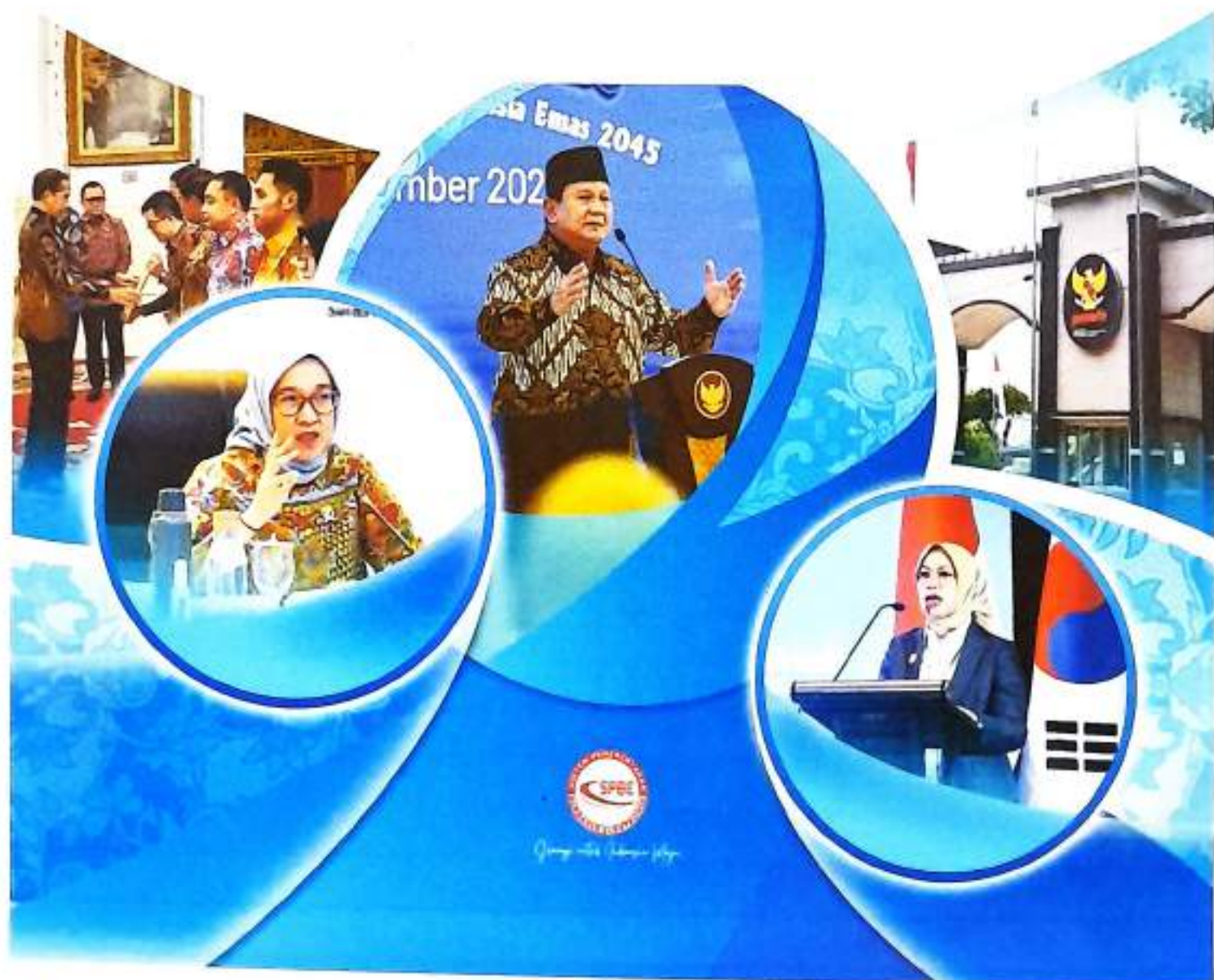


HI. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.

Pangkat : Penata Tk 1/ III d
NIP. 197605022014072002

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

**PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN
SELAYAR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



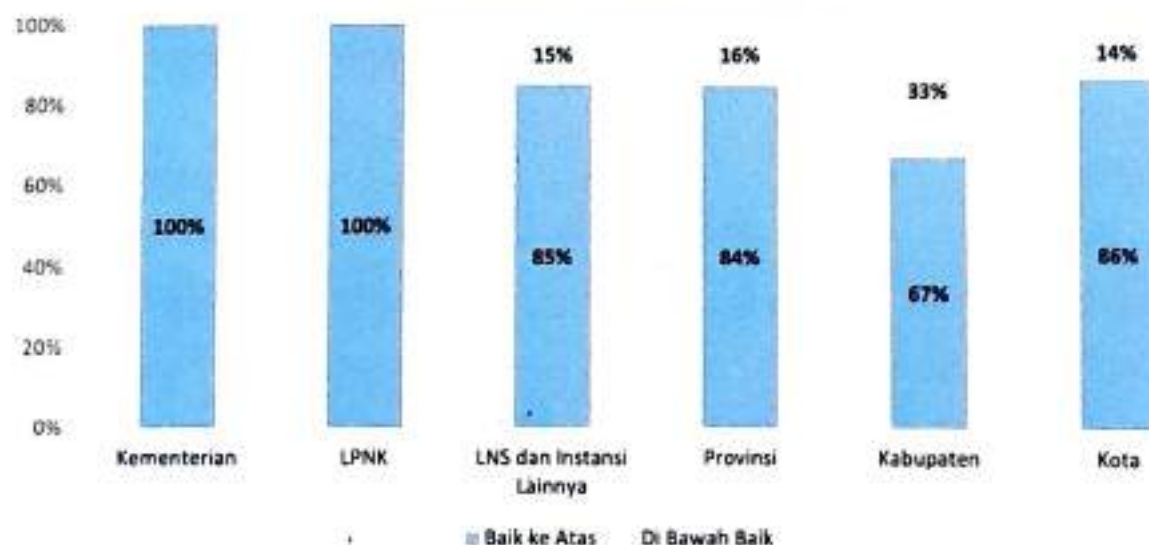
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)			NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS				PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0				Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2				Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5				Baik *)																	
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

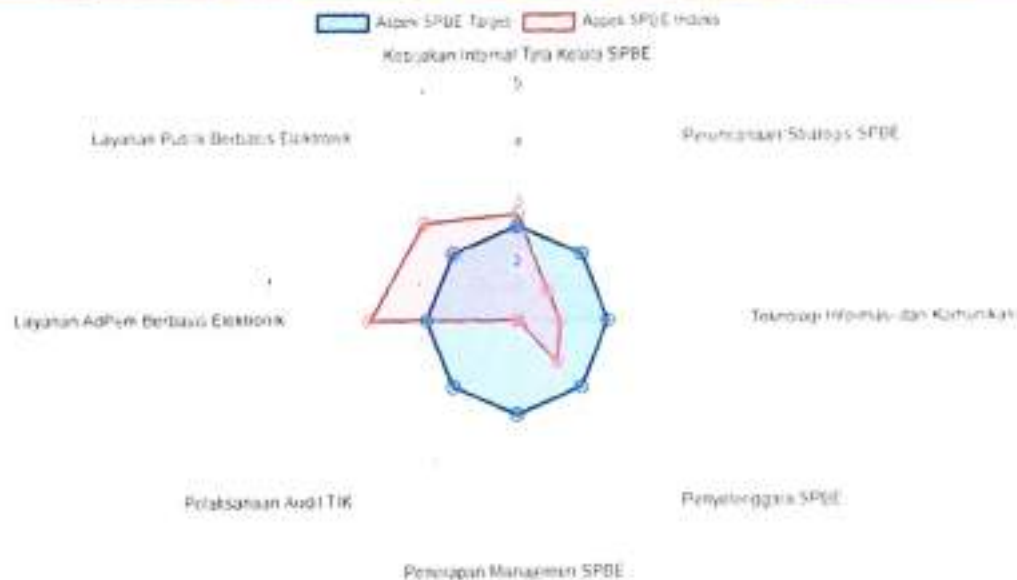
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,57
Domain Kebijakan SPBE	2,80
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,80
Domain Tata Kelola SPBE	1,80
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,49
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,60
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,33

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara umum kebijakan internal tata kelola SPBE Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar telah terintegrasi kecuali pada indikator Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan SPBE dan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

- **Kekuatan**
Belum tampak ada kekuatan pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE di Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar yang menonjol
- **Kelemahan**
Kelemahan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada kurangnya integrasi kebijakan internal pada indikator tertentu. Meskipun secara umum kebijakan internal telah terintegrasi dengan baik, masih terdapat kekurangan pada Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan SPBE dan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengelolaan sistem yang dapat memengaruhi konektivitas antar layanan SPBE serta potensi kerentanan dalam keamanan informasi.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara umum Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang telah dipenuhi Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar telah terdokumentasi kecuali untuk Inovasi Proses Bisnis SPBE

- **Kekuatan**
Kekuatan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang telah dimiliki Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar adalah sudah adanya Arsitektur dan Peta Jalan SPBE walaupun belum lengkap
- **Kelemahan**
Kelemahan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada belum terpenuhinya dokumen terkait Inovasi Proses Bisnis SPBE. Meskipun secara umum perencanaan strategis SPBE telah terdokumentasi sesuai dengan kriteria level 2, absennya inovasi dalam proses bisnis menunjukkan adanya keterbatasan dalam mengidentifikasi, merancang, atau mengimplementasikan langkah-langkah yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan SPBE.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara umum Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar masih bersifat Ad Hoc kecuali untuk Layanan Jaringan Intra SPBE

- **Kekuatan**
Kekuatan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dimiliki Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar hanya pada Layanan Jaringan Intra SPBE
- **Kelemahan**
Kelemahan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada karakteristik yang masih bersifat Ad Hoc, dengan pengecualian pada Layanan Jaringan Intra SPBE yang telah memenuhi kriteria lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan TIK di luar layanan jaringan intra belum terencana secara strategis, tidak terintegrasi, dan bersifat sporadis dalam mendukung pengelolaan dan pelayanan SPBE. Kondisi ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas implementasi TIK sebagai enabler utama SPBE.

D. Penyelenggara SPBE

Secara umum Aspek Penyelenggara SPBE dari Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar hanya mencapai taraf Teridentifikasi

- **Kekuatan**
Tidak ada kekuatan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang telah dimiliki Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar secara nyata
- **Kelemahan**
Kelemahan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada tingkat pencapaian yang masih berada pada taraf Teridentifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPBE sudah teridentifikasi, namun koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar penyelenggara belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dapat mengakibatkan pelaksanaan SPBE yang kurang efisien dan tidak terintegrasi dengan baik. Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPBE, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat koordinasi antar penyelenggara dan memastikan adanya kolaborasi yang strategis dalam menjalankan program dan layanan SPBE.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara umum Aspek Penerapan Manajemen SPBE pada Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar masih dalam taraf Rintisan dalam semua indikator karena belum ada perencanaan

- Kekuatan
Belum ada kekuatan nyata pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE pada Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar untuk Aspek ini
- Kelemahan
Kelemahan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah belum adanya dokumen formal yang mengatur penerapan manajemen SPBE, sehingga seluruh indikator pada aspek ini berada pada taraf Rintisan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan perencanaan yang terstruktur dan strategis, yang mengakibatkan pelaksanaan manajemen SPBE berjalan tanpa panduan yang jelas.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara umum Aspek Audit TIK pada Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar belum Dilaksanakan sehingga mendapatkan nilai 1

- Kekuatan
Tidak ada kekuatan pada Aspek Audit TIK yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
- Kelemahan
Kelemahan pada Aspek 6 Audit TIK Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada belum dilaksanakannya audit secara formal, sehingga aspek ini berada pada taraf Rintisan. Ketiadaan audit TIK mengindikasikan bahwa belum ada mekanisme evaluasi untuk menilai kesesuaian implementasi teknologi informasi dan komunikasi terhadap standar, regulasi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat menyebabkan potensi risiko dalam pengelolaan TIK, termasuk kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian kualitas.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara umum Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar dengan baik pada semua indikator yang ada kecuali Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara

- Kekuatan
Kekuatan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dimiliki Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar adalah hampir semua Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Layanan administrasi sudah dilaksanakan dan bersifat Kolaboratif
- Kelemahan
Kelemahan pada Aspek 7 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada belum optimalnya Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara. Meskipun secara keseluruhan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik telah memenuhi kriteria Kolaboratif pada hampir semua indikator, absennya integrasi pada layanan ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pengelolaan aset negara secara digital. Hal ini dapat memengaruhi efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan barang milik negara serta berpotensi menghambat akuntabilitas administrasi pemerintahan.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara umum Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar pada level Transaksi

- Kekuatan
Kekuatan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah dimiliki Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar adalah adanya sudah digunakannya aplikasi Sp4n Lapar dan JDIH
- Kelemahan
Kelemahan pada Aspek 8 Layanan Publik Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah meskipun telah berada pada level Transaksi, layanan ini belum sepenuhnya mencapai tingkat Kolaboratif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah dapat melakukan interaksi hingga transaksi secara elektronik, layanan tersebut belum terintegrasi secara menyeluruh antar instansi atau pihak terkait. Kondisi ini membatasi efisiensi, interoperabilitas, dan potensi peningkatan kualitas layanan publik.

REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu fokus pada penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan strategis yang komprehensif, khususnya untuk aspek yang masih lemah seperti Inovasi Proses Bisnis, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK. Selain itu, diperlukan langkah-langkah integrasi layanan, termasuk Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara dan peningkatan Layanan Publik Berbasis Elektronik menuju level kolaboratif. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan koordinasi antar penyelenggara SPBE melalui mekanisme tata kelola yang lebih terstruktur, disertai dengan pelaksanaan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Dengan pengembangan teknologi yang berorientasi pada inovasi dan kolaborasi, diharapkan SPBE dapat memberikan layanan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3

SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia

Iliria Negara, Jakarta
27 Mei 2024



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Silakan untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-733/01000/ES/2024

Jakarta, 17 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Yth. Bupati Kepulauan Selayar

di -

Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada **Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar**.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar**.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar** tahun 2024 adalah **1,83** dengan predikat "**Cukup**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar**. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar**.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.



Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Dalam Negeri.



Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar



BADAN PUSAT STATISTIK



EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.





METODOLOGI

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai (1)	Predikat (2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang





Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

→ DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi		Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas		Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data		Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebutan Data			
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyajian Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisi	Pengolahan	Analisis	Diseminasi			
Kelembagaan	Profesionalitas			SDM yang Memadai dan Kapabel			Pengorganisasian Statistik			
	Transparansi Informasi	Negativitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Komunikasi dan Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Wadada
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik			Penggunaan SDI Berkelanjutan			
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik			Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data	

Catatan:

Domain Aspek Indikator

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

Tabel 3
Nilai Indeks Hasil EPSS 2024 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPS	2,35	2,78	2,81	2,25	2,55	2,25	2,51
Domain Prinsip SDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualitas Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35





HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2024

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

- Kompilasi Data Balita *Stunting* Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2023
- Survei Keluarga Beresiko *Stunting* Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2023

HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,32
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,00
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	1,53
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	1,46
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	1,83





Tabel 5
Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek (1)	Bobot ¹ (2)	Nilai Indeks (3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	3,00
Metadata Statistik	25%	3,00
Interoperabilitas Data	25%	1,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	2,00
Akurasi	16%	1,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	1,00
Aksesibilitas	21%	1,00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	1,50
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	2,00
Pengumpulan Data	26%	2,00
Pemeriksaan Data	21%	2,00
Penyebarluasan Data	21%	2,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	1,00
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	1,00
Pengorganisasian Statistik	35%	2,50
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	2,34
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	1,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	1,00

Catatan: ¹ Bobot aspek pembentuk indeks domain





KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Aspek Metadata Statistik, dan Aspek Kode Referensi dan/atau Data Induk di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah berada pada predikat baik dan telah diterapkan oleh seluruh produsen data. Variabel-variabel yang digunakan dari kegiatan statistik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah menerapkan standar data statistik. Selain itu, kegiatan statistik tersebut juga sudah dilengkapi dengan metadata statistik berdasarkan struktur dan format baku yang telah ditetapkan oleh pembina data statistik. Statistik yang dihasilkan juga sudah menggunakan kode referensi kependudukan dan kode wilayah administrasi Kementerian Dalam Negeri.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Interoperabilitas Data di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada predikat kurang. Belum ditemukan bukti dukung relevan yang menunjukkan penerapan interoperabilitas data atau kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menyusun prosedur baku terkait penerapan Aspek Interoperabilitas Data.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan:

- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki keunggulan pada Domain Kualitas Data karena seluruh aspek belum mencapai predikat baik dan seluruh indikator belum ada yang mencapai tingkat kematangan terdefinisi.





Kekurangan:

- Penerapan Aspek Relevansi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada predikat cukup. Sedangkan, penerapan Aspek Akurasi, Aspek Kualitas dan Ketepatan Waktu, Aspek Aksesibilitas, dan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi masih berada pada predikat kurang.
- Penerapan Aspek Relevansi terkait Relevansi Data Terhadap Pengguna dan Proses Identifikasi Kebutuhan Data dan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Keterbandingan Data telah dilaksanakan oleh seluruh produsen data namun masih berdasarkan kepentingannya masing-masing.
- Penerapan Aspek Akurasi, Aspek Kualitas dan Ketepatan Waktu, Aspek Aksesibilitas, dan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Konsistensi Statistik belum dilaksanakan oleh seluruh produsen data.

Rekomendasi:

- Perlu adanya kolaborasi antara produsen data dan walidata di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penerapan seluruh aspek pada domain kualitas data.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu membuat suatu kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aksesibilitas, Keterbandingan dan Konsistensi.

3. Domain Proses Bisnis Statistik

Keunggulan:

- Secara umum penerapan Domain Proses Bisnis Statistik pada penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong dalam kategori cukup. Terdapat 2 (dua) indikator yang berada pada tingkat kematangan Terdefinisi, yaitu Pendefinisian Kebutuhan Statistik dan Analisis Data.
- Penerapan Aspek Perencanaan Data terkait pendefinisian kebutuhan statistik di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah ditunjukkan oleh adanya dokumen kebijakan berupa standar baku yang mengatur tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, serta penyebarluasan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Di samping itu, dokumen kebijakan juga telah dilengkapi dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 110 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Selayar.





Kekurangan:

- Penerapan Aspek Perencanaan Data terkait penyiapan instrumen, Aspek Pengumpulan Data, dan Aspek Penyebarluasan Data di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah dilakukan oleh seluruh produsen data, namun masih merujuk pada pedoman di unit kerja produsen masing-masing.
- Penerapan Aspek Perencanaan Data terkait proses desain statistik dan Aspek Pemeriksaan Data terkait proses pengolahan data belum dilaksanakan oleh seluruh produsen data, dimana tidak ditemukan bukti dukung yang menunjukkan adanya penerapan pelaksanaan desain statistik dan penerapan pelaksanaan pengolahan data pada kegiatan Survei Keluarga Beresiko *Stunting*.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menyusun proses bisnis statistik yang terstandar untuk proses pendefinisian kebutuhan statistik, desain statistik, dan pengumpulan data yang berlaku bagi seluruh produsen data.

4. Domain Kelembagaan

Keunggulan:

- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait kolaborasi dengan pembina data statistik dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data telah dilakukan dimana setiap kegiatan memiliki bukti dukung notulensi, absen, undangan, permintaan materi yang didukung dengan penetapan Forum Satu Data Kabupaten Kepulauan Selayar, salinan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dan SK TPK 2023 PERUBAHAN.

Kekurangan:

- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum melakukan penjaminan transparansi informasi statistik dengan melakukan penyebaran data yang disertai dengan metadata sehingga publik dapat mengakses informasi terkait cara pengumpulan, sumber data, konsep, dan metodologi dari data tersebut.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum melakukan penerapan kompetensi SDM Bidang Statistik dan SDM Bidang Manajemen Data secara menyeluruh.

1



Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu melakukan penjaminan transparansi informasi statistik dengan melakukan penyebaran data yang disertai dengan metadata sehingga publik dapat mengakses informasi terkait cara pengumpulan, sumber data, konsep, dan metodologi dari data tersebut.

5. Domain Statistik Nasional

Keunggulan:

- Secara umum penerapan Domain Statistik Nasional di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tergolong dalam kategori Kurang. Dari 3 (tiga) aspek pada Domain Statistik Nasional, hanya satu diantaranya telah termasuk dalam kategori Cukup, yaitu Aspek Pemanfaatan Data Statistik. Dari aspek tersebut, terdapat dua indikator yang telah berada pada tingkat kematangan terdefinisi, yaitu Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan dan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan. Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada predikat Cukup. Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik terkait penggunaan data statistik dasar dan sektoral telah dilakukan oleh produsen data bersama Walidata sesuai kepentingan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023.

Kekurangan:

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik terkait sosialisasi dan literasi data statistik belum dilaksanakan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik dan Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional Berkelanjutan belum dilaksanakan oleh seluruh produsen data. Belum ada bukti dukung yang menjelaskan bahwa kedua proses tersebut dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Rekomendasi:

- Perlu adanya kolaborasi antara produsen data dan walidata di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pemanfaatan data statistik, pengelolaan kegiatan statistik, dan penguatan SSN berkelanjutan.
- Untuk memperluas pemanfaatan data statistik yang dihasilkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu melakukan sosialisasi dan literasi data statistik kepada pengguna.



- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu melaksanakan rencana pembangunan statistik yang sudah ditetapkan, menyusun peraturan mengenai penyebaran data melalui walidata, dan melakukan kajian terhadap pemanfaatan *big data*.





TINGKAT KEMATANGAN PER INDIKATOR

Tabel 6
Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	3,00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	3,00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	1,00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	3,00
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna	60%	2,00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	2,00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	1,00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	1,00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	1,00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	1,00
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	1,00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	1,00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	2,00
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	1,00
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	3,00





Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	1,00
		Tingkat Kematangan Penylapan Instrumen	34%	2,00
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	2,00
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	1,00
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	3,00
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	2,00
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	1,00
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	1,00
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	1,00
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	3,00
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan	34%	3,00





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG SALING TERKONEKSI DI JARINGAN
INTRA PEMERINTAH ATAU MENGGUNAKAN AKSES INTERNET YANG
DIAMANKAN YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO

No.	Nama Perangkat Daerah
1.	BKPSDM
2.	BAPPELITBANGDA
3.	BPBD
4.	BPKPD
5.	DIKPORA
6.	DINKES
7.	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
8.	DINAS SOSIAL
9.	DINAS PERHUBUNGAN
10.	DISPERINDAGKUM
11.	DPRD
12.	DP3AP2KB
13.	DISDUKCAPIL
14.	INSPEKTORAT
15.	KESBANG
16.	DISKOMINFO-SP
17.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
18.	PARIWISATA
19.	DIS PMD

20.	DINAS PERIKANAN
21.	DINAS PERPUSTAKAAN
22.	DINAS PERTANIAN
23.	DIS PMPTSPTK
24.	SATPOLPP DAMKAR
25.	DINAS PUTR
26.	SEKRETARIAT DAERAH

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata TK. 1
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN AKSES INTERNET
YANG BERKUALITAS YANG DISEDIAKAN OLEH DISKOMINFO-SP**

No.	PERANGKAT DAERAH
1.	SEKRETARIAT DAERAH
2.	DPRD
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.	DINAS KESEHATAN
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN
9.	DINAS SOSIAL
10.	DINAS PERTANIAN
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13.	DINAS PERHUBUNGAN
14.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
15.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
16.	DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
17.	DINAS PERIKANAN
18.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
19.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
20.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
21.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
22.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
23.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
24.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
25.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
26.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN

Benteng, 25 Januari 2025

plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,


Hj. ANDI DWYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

Arsip Permintaan fasilitas Zoom Meeting Tahun 2024

No	Tgl Surat	Surat Dari	Nomor Surat
1	31/01/2024	BUPATI KEPULAUAN SELAYAR	002/097/I/2024/DiSPARBU
2	22/01/2024	KEMENDAGRI	500.2.3/364/SI
3	09/02/2024	KEMENDAGRI	500.2.3/742/SI
4	25/03/2024	BAPPELITBANGDA	050/166/III/2024/Bappelitbangda
5	06/03/2024	KEMENDAGRI	500.2.3/1226/SI
6	29/04/2024	BAPPELITBANGDA	050/ /IV/2024/Bappelitbangda
7	29/04/2024	SEKRETARIAT DAERAH	55/HUK/IV/2024
8	26/04/2024	BAPPELITBANGDA	050/206/IV/2024/Bappelitbangda
9	25/04/2024	SEKRETARIAT DAERAH	54/HUK/IV/2024
10	26/04/2024	SEKRETARIAT DAERAH	555/44/IV/2024/Umpo
11	08/05/2024	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	047/195/V/2024/DP3AP2KB
12	10/06/2024	BANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI	075/244-CD. WIL.VI/S/DISDIK
13	11/06/2024	PROVINSI SULAWESI SELATAN	400.14.3/7005/DiskominfoSP
14	22/07/2024	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	047/402/VII/2024/DP3AP2KB
15	05/07/2024	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	400.10.1.1/2087/Polpum
16	26/07/2024	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIK RI	8-162/DJPP.3/PI.02.01/07/2024
17	19/08/2024	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	047/438/VIII/2024/DP3AP2KB
18	20/08/2024	BAPPELITBANGDA	000.1.5/3286/Bappelitbangda
19	09/08/2024	POLITIK DAN PEPERINTAHAN UMUM	400.10.1.1/e-370/Polpum
20	25/09/2024	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH	400.5.7/748/Bangda
21	25/11/2024	DINAS PERIKANAN	523/1407/XI/2024DISPER
22	18/11/2024	SEKRETARIAT DAERAH	555/145/XI/2024/UMPRO
23	04/11/2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	800/194/XI/2024/DIS.PMD
24	05/12/2024	DINAS KESEHATAN	800/4181/XII/TAHUN 2024/DINKES

Benteng, 25 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,

H. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. 1
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI PORTAL DAN SITUS WEB
YANG SESUAI STANDAR
TAHUN 2024

No.	Nama OPD	Nama Portal dan Situs Web
1	Inspektorat Kabupaten	inspektorat.kepulauanselayarkab.go.id
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	www.kepulauanselayarkab.go.id portal.kepulauanselayarkab.go.id ppid.kepulauanselayarkab.go.id tte.kepulauanselayarkab.go.id
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	dikbud.kepulauanselayarkab.go.id/
4	DPRD	dprd.kepulauanselayarkab.go.id jdih.dprd.kepulauanselayarkab.go.id ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id aspirasi.dprd.kepulauanselayarkab.go.id
5	BKPSDM	bkd.kepulauanselayarkab.go.id apel.bkd.kepulauanselayarkab.go.id pangkat.bkd.kepulauanselayarkab.go.id satya.bkd.kepulauanselayarkab.go.id pengaduan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id simpole.kepulauanselayarkab.go.id dilan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id sipeka.bkd.kepulauanselayarkab.go.id tubel.kepulauanselayarkab.go.id simpeg.kepulauanselayarkab.go.id ekinerja.kepulauanselayarkab.go.id
6	Dinas Sosial	dinsos.kepulauanselayarkab.go.id
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id

8	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	bappelitbangda.kepulauanselayarkab.go.id
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.kepulauanselayarkab.go.id
11	SETDA Bagian Organisasi Bagian Pengadaan Barang Jasa Bagian Hukum	sibija.kepulauanselayarkab.go.id silajara.kepulauanselayarkab.go.id lpse.kepulauanselayarkab.go.id jdih.kepulauanselayarkab.go.id

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN
LAYANAN APLIKASI UMUM DAN APLIKASI KHUSUS YANG DITETAPKAN
SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 2024**

No.	Nama OPD	Nama Website/ Aplikasi/ Sistem Administrasi
1	Inspektorat Kabupaten	inspektorat.kepulauanselayarkab.go.id
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	www.kepulauanselayarkab.go.id portal.kepulauanselayarkab.go.id ppid.kepulauanselayarkab.go.id tte.kepulauanselayarkab.go.id
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	dikbud.kepulauanselayarkab.go.id/
4	DPRD	dprd.kepulauanselayarkab.go.id jdih.dprd.kepulauanselayarkab.go.id ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id aspirasi.dprd.kepulauanselayarkab.go.id
5	BKPSDM	bkd.kepulauanselayarkab.go.id apel.bkd.kepulauanselayarkab.go.id pangkat.bkd.kepulauanselayarkab.go.id satya.bkd.kepulauanselayarkab.go.id pengaduan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id simpole.kepulauanselayarkab.go.id dilan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id sipeka.bkd.kepulauanselayarkab.go.id tubel.kepulauanselayarkab.go.id simpeg.kepulauanselayarkab.go.id ekinerja.kepulauanselayarkab.go.id
6	Dinas Sosial	dinsos.kepulauanselayarkab.go.id

7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id
8	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	bappelitbangda.kepulauanselayarkab.go.id
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.kepulauanselayarkab.go.id
11	SETDA Bagian Organisasi Bagian Pengadaan Barang Jasa Bagian Hukum	sibija.kepulauanselayarkab.go.id silajara.kepulauanselayarkab.go.id lpse.kepulauanselayarkab.go.id jdih.kepulauanselayarkab.go.id

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



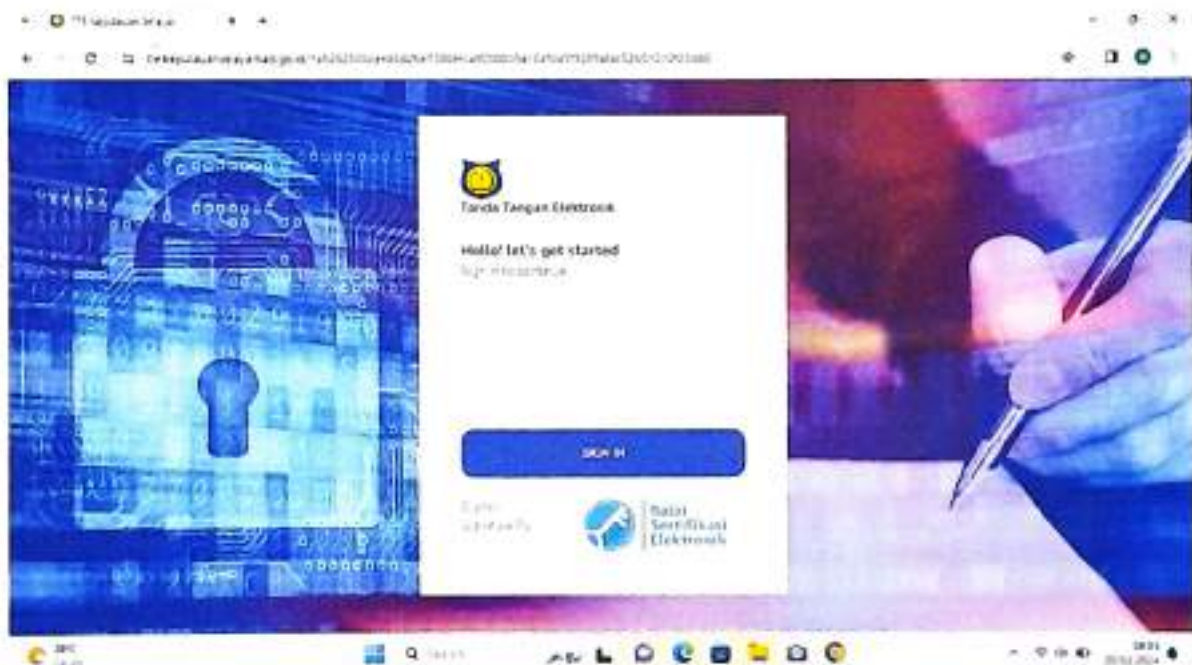
Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**LAYANAN SPBE (LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN) YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN PROSES BISNIS
YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN SECARA ELEKTRONIK
TAHUN 2024**



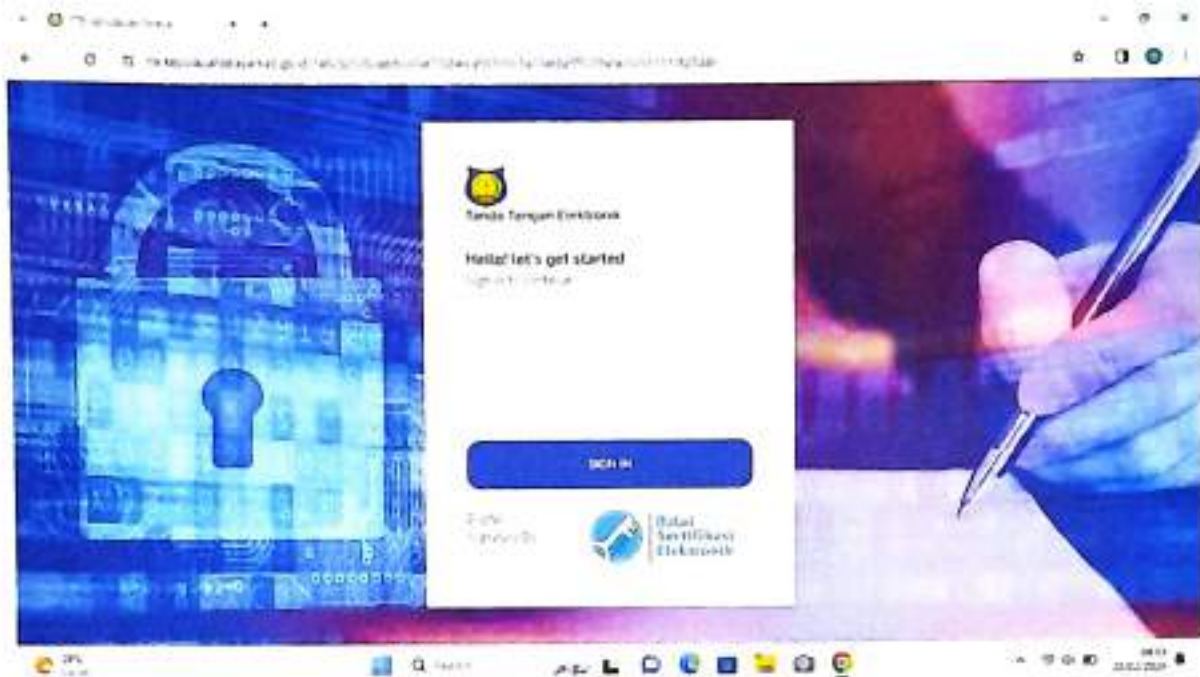


Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,

Hj. ANDI DWITYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002





Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002

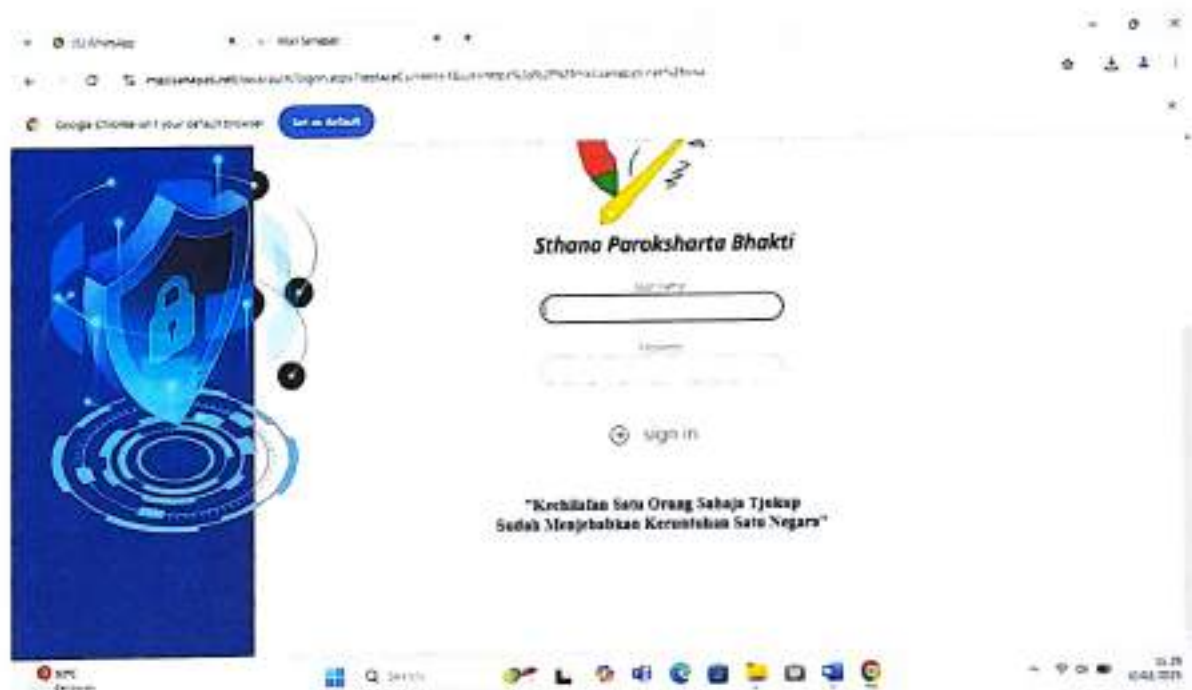


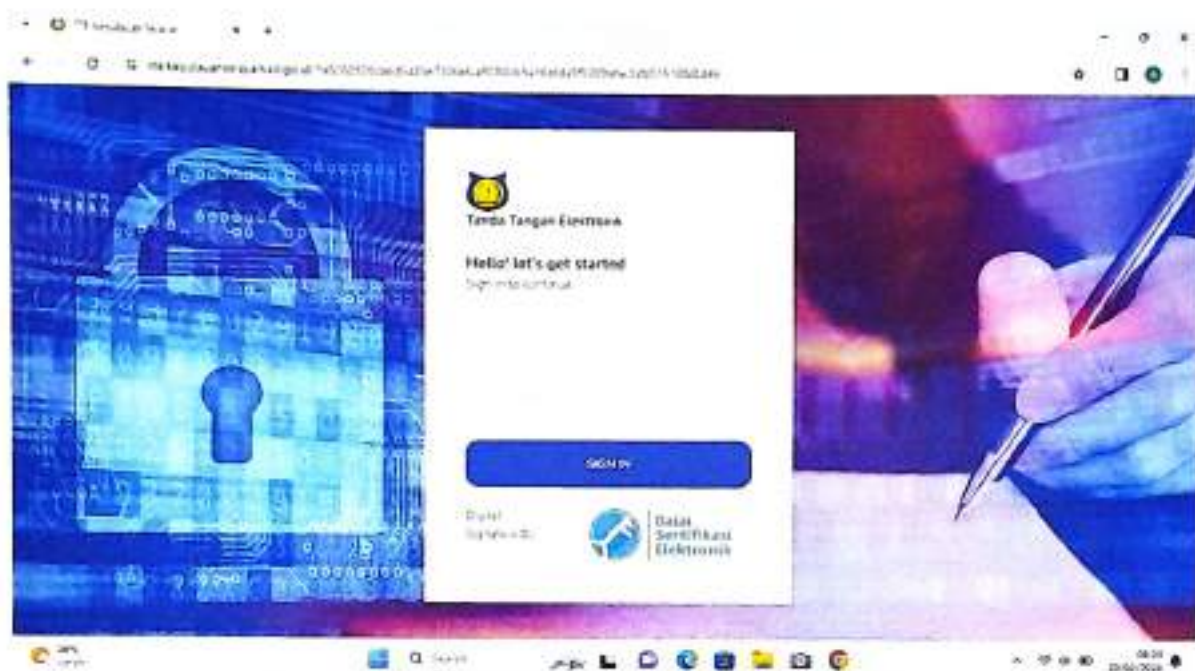
**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**JUMLAH SISTEM ELEKTRONIK YANG TERDAFTAR SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TAHUN 2024





Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,

HJ. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.,M.M.

Pangkat. Penata Tk. I

NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**DATA LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI YANG
TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
TAHUN 2025**

No.	Nama OPD	Nama Website/ Aplikasi/ Sistem Administrasi
1.	LPSE	http://lpse.kepulauanselayarkab.go.id/eprocl
2.	OSS	http://pmptsgtk.kepulauanselayarkab.go.id/index.php/oss-republik-indonesia
3.	SIPD KEUANGAN	https://sipd-ri.kemendagri.go.id/auth/login
4.	TEMANKU	Sistem Informasi layanan Kepegawaian Terpadu merupakan Layanan Kepegawaian yang disediakan oleh BKPSDM yang dapat diakses melalui aplikasi android yang dapat di download melalui playstore
5.	SMART BAPENDA	SMART BAPENDA merupakan Aplikasi Android yang bertujuan untuk mendukung pemutakhiran data Objek Pajak PBB dan BPHTB secara online dengan peran serta langsung oleh Wajib Pajak
6.	TTE	http://tte.kepulauanselayarkab.go.id
7.	Peta Bencana	https://hpbid.kepulauanselayarkab.go.id/peta/
8.	SIPATUO	SIPATUO (Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online) melalui APK Android dan dapat di download melalui Playstore merupakan Sebuah Aplikasi Android untuk mengajukan permohonan perizinan secara online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar.
9.	SIMANTAN	http://simantan.kepulauanselayarkab.go.id/
10.	SILADUS	https://siladus.kepulauanselayarkab.go.id/
11.	EPUSDA	Epusda (Elektronik Perpustakaan daerah) merupakan Layanan Perpustakaan Elektronik milik Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat di download langsung melalui Playstore.
12.	Registrasi Online	Registrasi Rawat jalan online RSUD KH Hayyung yang dapat di download melalui playstore.
13.	Antrian Online	Antrian Online dan Kepuasan Masyarakat Puskesmas Benteng yang merupakan aplikasi antrian rawat jalan yang disediakan oleh Puskesmas Benteng dalam bentuk aplikasi Android yang dapat di download melalui Playstore

14.	c-Bos	https://bos.kepulauanselayarkab.go.id/
15.	JDHH	https://jdih.kepulauanselayarkab.go.id/public/
16.	SIMPEG	http://simpeg.kepulauanselayarkab.go.id/login.php
17.	E-Kinerja	http://ekinerja.kepulauanselayarkab.go.id/login.php
18.	Apel	http://bkd.kepulauanselayarkab.go.id/apel/login.php
19.	SIPANDA	SIPANDA (Sistem Informasi Pengaduan Bencana Daerah) merupakan Aplikasi Android untuk Pengaduan Bencana
20.	PPID	https://ppid.kepulauanselayarkab.go.id/
21.	TPID	https://tpid.kepulauanselayarkab.go.id/
22.	Simpelnaker	https://simpelnaker.kepulauanselayarkab.go.id/

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

DATA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN LAYANAN PUSAT
DATA PEMERINTAH

TAHUN 2024

No.	PERANGKAT DAERAH
1.	SEKRETARIAT DAERAH
2.	DPRD
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.	DINAS KESEHATAN
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN
9.	DINAS SOSIAL
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11.	DINAS PERTANIAN
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14.	DINAS PERHUBUNGAN
15.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
17.	DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
18.	DINAS PERIKANAN
19.	DINAS KEPARIWISATAAN
20.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
21.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
22.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
23.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

25.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
28.	KECAMATAN BONTOMATENE
29.	KECAMATAN BONTOMANAI
30.	KECAMATAN BUKI
31.	KECAMATAN BENTENG
32.	KECAMATAN BONTOHARU
33.	KECAMATAN BONTOSIKUYU
34.	KECAMATAN PASIMASUNGGU
35.	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR
36.	KECAMATAN PASIMARANNU
37.	KECAMATAN PASILAMBENA
38.	KECAMATAN TAKABONERATE

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**DATA PERANGKAT DAERAH YANG MENYIMPAN DATA DI PUSAT DATA
PEMERINTAH**

TAHUN 2024

No.	PERANGKAT DAERAH
1.	SEKRETARIAT DAERAH
2.	DPRD
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.	DINAS KESEHATAN
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN
9.	DINAS SOSIAL
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11.	DINAS PERTANIAN
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14.	DINAS PERHUBUNGAN
15.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
17.	DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
18.	DINAS PERIKANAN
19.	DINAS KEPARIWISATAAN
20.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
21.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
22.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
23.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

25.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
28.	KECAMATAN BONTOMATENE
29.	KECAMATAN BONTOMANAI
30.	KECAMATAN BUKI
31.	KECAMATAN BENTENG
32.	KECAMATAN BONTOHARU
33.	KECAMATAN BONTOSIKUYU
34.	KECAMATAN PASIMASUNGGU
35.	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR
36.	KECAMATAN PASIMARANNU
37.	KECAMATAN PASILAMBENA
38.	KECAMATAN TAKABONERATE

Benteng, 25 Januari 2025

plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**DATA PERANGKAT DAERAH YANG MEMPERBAHARUI DATANYA SESUAI
SIKLUS JENIS DATA**

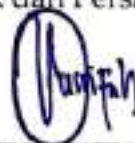
TAHUN 2024

No.	PERANGKAT DAERAH
1.	SEKRETARIAT DAERAH
2.	DPRD
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.	DINAS KESEHATAN
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN
9.	DINAS SOSIAL
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11.	DINAS PERTANIAN
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14.	DINAS PERHUBUNGAN
15.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
17.	DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
18.	DINAS PERIKANAN
19.	DINAS KEPARIWISATAAN
20.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
21.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
22.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
23.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
25.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
28.	KECAMATAN BONTOMATENE
29.	KECAMATAN BONTOMANAI
30.	KECAMATAN BUKI
31.	KECAMATAN BENTENG
32.	KECAMATAN BONTOHARU
33.	KECAMATAN BONTOSIKUYU
34.	KECAMATAN PASIMASUNGGU
35.	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR
36.	KECAMATAN PASIMARANNU
37.	KECAMATAN PASILAMBENA
38.	KECAMATAN TAKABONERATE

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.,M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**DATA PERANGKAT DAERAH YANG MENGIMPLEMENTASI INOVASI YANG
MENDUKUNG SMART CITY**

TAHUN 2024

No.	Perangkat Daerah
1.	INSPEKTORAT KABUPATEN
2.	DINAS SOSIAL
3.	Sekretariat DPRD
4.	BPKPSDM
5.	DISKOMINFOSP
6.	DISDIKPORA
7.	SETDA
8.	BAPPELITBANGDA
9.	BPKAD
10.	BPBD
11.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,

Hj. ANDRIWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. I



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

DATA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI SISTEM ELETRONIK
TAHUN 2024

No.	Perangkat Daerah
1.	Sistem Elektronik Inspektorat Kabupaten
2.	Sistem Elektronik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	Sistem Elektronik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.	Sistem Elektronik Sekretariat Daerah
5.	Sistem Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
6.	Sistem Elektronik Sekretariat DPRD
7.	Sistem Elektronik Dinas Sosial
8.	Sistem Elektronik Perpustakaan dan Kearsipan
9.	Sistem Elektronik Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
10.	Sistem Elektronik BAPPELITBANGDA
11.	Sistem Elektronik BPBD

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,

Hj. ANDIWTYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

DATA MITRA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

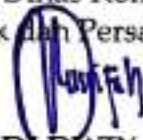
TAHUN 2024

No.	Nama Media
1.	BERITA KOTA MAKASSAR
2.	UJUNG PANDANG EKSPRES
3.	RAKYAT SULSEL
4.	RADAR SELATAN
5.	PANRITA
6.	BONEPOS
7.	RAKYAT NEWS
8.	LINSTING NUSANTARA
9.	CELEBES
10.	MATA NEWS
11.	BUKA BACA
12.	KLIK DATA
13.	SELAYAN NEWS
14.	MEDIA SELAYAR
15.	BUKA BERITA
16.	MEDIATA
17.	LP RI
18.	BENTENG NEWS

19.	BUGISPOS
20.	MITRA SULAWESI
21.	WASPADA POS
22.	WAJAH INDONESIA
23.	INET NEWS
24.	POROS TENGAH

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Hj. ANDRI DWITYANTI MUSRIFAH, S.E.,M.M.

Pangkat. Penata Tk. I

NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

DATA KONTEN INFORMASI
TAHUN 2024

No.	Nama Media	Jumlah Berita
1.	WEBSITE	323
2.	TIKTOK	206
3.	SNACK VIDEO	140
4.	FACEBOOK KEP SELAYAR	221
5.	FACEBOOK PPID	161
6.	INSTAGRAM PPID	69
7.	TWITTER DISKOMINFO	32
8.	WEBSITE PPID	28
9.	INSTAGRAM KEPULAUAN SELAYAR	173
10.	YOUTUBE	-
JUMLAH		1.353

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,

Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**DATA LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DILAKSANAKAN SESUAI
STRAKOM**

TAHUN 2024

No.	Perangkat Daerah
1.	Youtube (kominfo selayar)
2.	Facebook (@kepulauan_selayar)
3.	Instagram (@kepulauan_selayar)
4.	Website (www.kepulauanselayar.go.id)
5.	Twitter (@kep_selayar)
6.	Tiktok (@humas.selayar)
7.	Snackvideo (humaskominfose)

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,

Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002

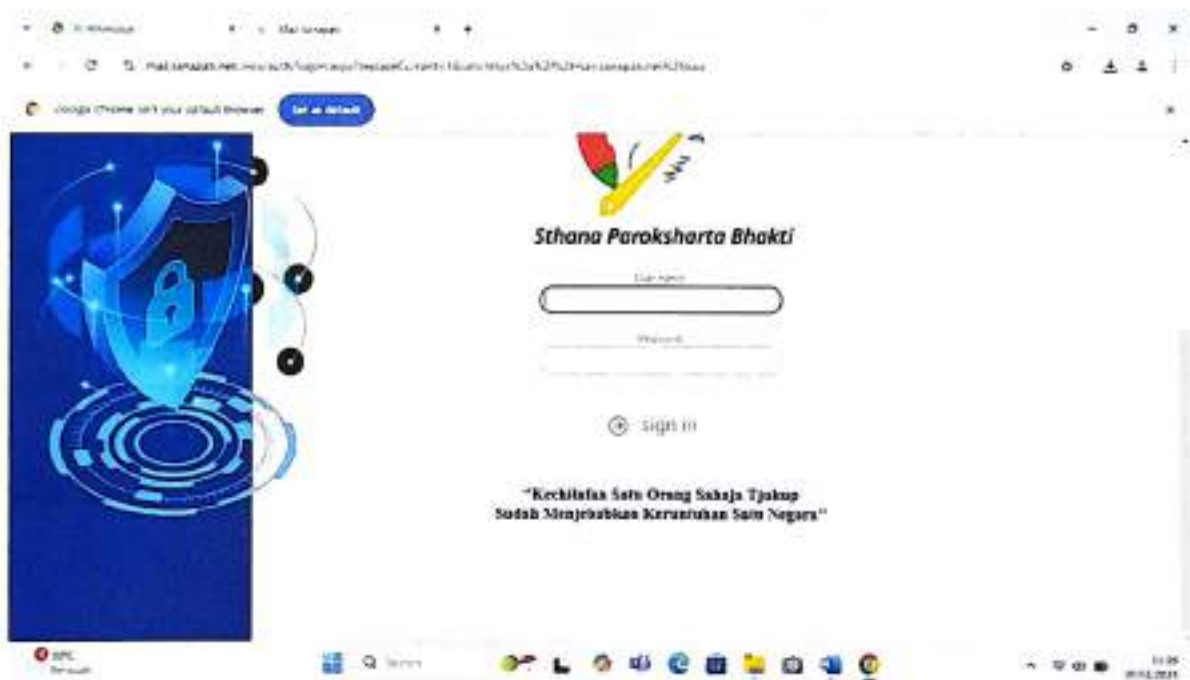


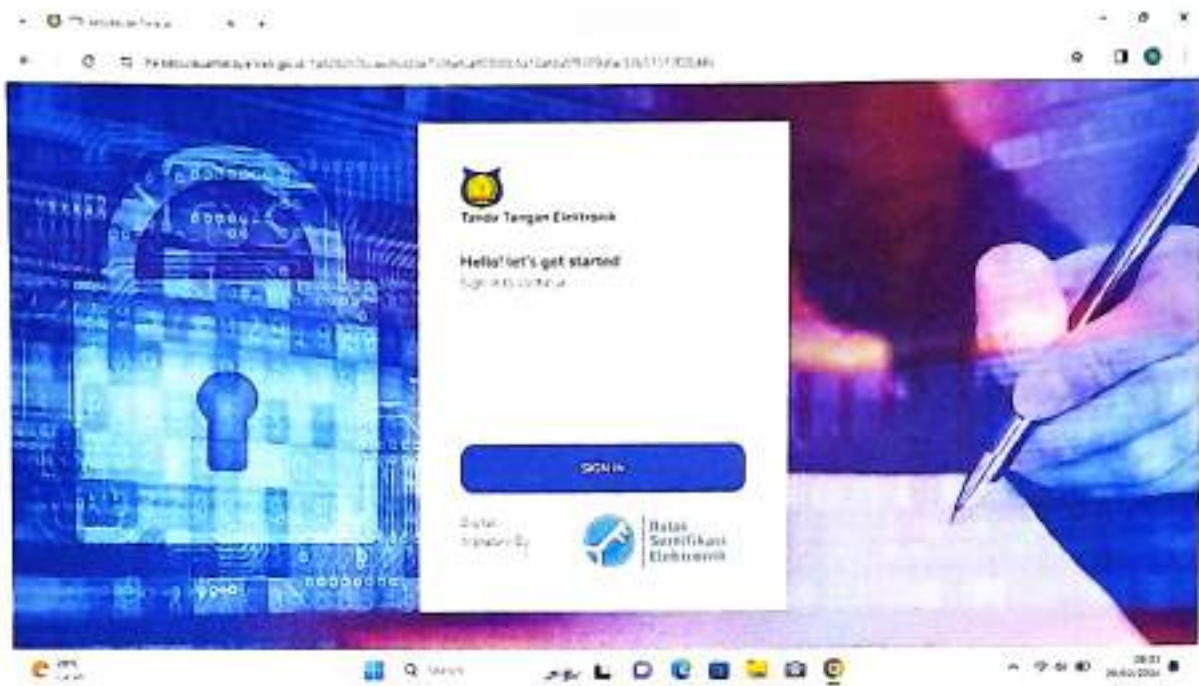
**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**JUMLAH SISTEM ELEKTRONIK YANG MENERAPKAN SMKI DAN
DIAMNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK ATAU APLIKASI PENYANDIAN**

TAHUN 2024





Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,

Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.

Pangkat. Penata Tk. I

NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

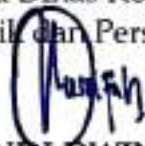
DATA SISTEM ELEKTRONIK ATAU ASET INFORMASI YANG TELAH DIAUDIT
RESIKO KATEGORI RENDAH
TAHUN 2024

No.	Nama OPD	Nama Sistem Elektronik
1.	Identifikasi kerawanan dan resiko system elektronik BPBD Kab. Kepulauan Selayar	bpbk.kepulauansehayarkab.go.id
2.	Identifikasi kerawanan dan resiko system elektronik Inspektorat Kabupaten Kab. Kepulauan Selayar	Inspektorat.kepulauansehayarkab.go.id Siladus.kepulauansehayarkab.go.id
3.	Identifikasi kerawanan dan resiko system elektronik Dinas PUTR Kab. Kepulauan Selayar	putr.kepulauansehayarkab.go.id Patroltaru.kepulauansehayarkab.go.id
4.	Identifikasi kerawanan dan resiko system elektronik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kepulauan Selayar	perputakaan.kepulauansehayarkab.go.id
5.	Identifikasi kerawanan dan resiko system elektronik BPKAD Kab. Kepulauan Selayar	bpkpd.kepulauansehayarkab.go.id
6.	Identifikasi kerawanan dan resiko system elektronik BAPPELITBANGDA Kab. Kepulauan Selayar	bappelitbangda.kepulauansehayarkab.go.id
7.	Identifikasi kerawanan dan resiko system elektronik Dinas Sosial Kab. Kepulauan Selayar	dinsos.kepulauansehayarkab.go.id
8.	Identifikasi kerawanan dan resiko system elektronik : 1. Bagian Hukum SETDA Kab. Kepulauan Selayar	jdih.kepulauansehayarkab.go.id

	2. Bagian Organisasi SETDA Kab. Kepulauan Selayar 3. Barjas Setda-LPSE Kab. Kepulauan Selayar	sibija.kepulauanselayarkab.go.id lpse.kepulauanselayarkab.go.id
9.	Identifikasi kerawanan dan resiko system elektronik Dinas Sosial Kab. Kepulauan Selayar	dinsos.kepulauanselayarkab.go.id
10.	Identifikasi kerawanan dan resiko system elektronik Dinas Pariwisata Kab. Kepulauan Selayar	pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id itourism.pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id
11.	Identifikasi kerawanan dan resiko system elektronik BKPSDM Kab. Kepulauan Selayar	bkd.kepulauanselayarkab.go.id apel.bkd.kepulauanselayarkab.go.id pangkat.bkd.kepulauanselayarkab.go.id satya.bkd.kepulauanselayarkab.go.id pengaduan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id simpole.bkd.kepulauanselayarkab.go.id sipeka.bkd.kepulauanselayarkab.go.id tubel.bkd.kepulauanselayarkab.go.id simpeg.kepulauanselayarkab.go.id ekinerja.kepulauanselayarkab.go.id dilan.bkd.kepulauanselayarkab.go.id
12.	Identifikasi kerawanan dan resiko system elektronik Disdikpora Kab. Kepulauan Selayar	dikbud.kepulauanselayarkab.go.id

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.

Pangkat. Penata Tk. I

NIP. 19760502 201407 2 002

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik	:	Sistem Elektronik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Domain Name System	:	kepulauanelayarkab.go.id
Sub Domain Name System	:	bpbd.kepulauanelayarkab.go.id
Nama Aplikasi	:	Website BPBD Kab. Kepulauan Selayar
Metode Audit/Assesment	:	Active Scanning Active Open Source Intelligent (OSINT)
Tanggal Audit/Assessment	:	2 September – 30 September 2024
Nama Tim Audit/Assessment	:	Tim Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Hasil Audit/Assessment	:	

I. Identifikasi Profil Sistem Elektronik

I.1. Identifikasi Tampilan Sistem Elektronik



**Tampilan Laman Beranda pada Website BPBD Kabupaten
Kepulauan Selayar**

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN KEAMANAN JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik	:	Sistem Elektronik Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar
Domain Name System	:	kepulauanelayarkab.go.id
Sub Domain Name System	:	a. inspektorat.kepulauanelayarkab.go.id b. siladus.kepulauanelayarkab.go.id
Nama Aplikasi	:	a. Website Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar b. Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat Selayar c. Web Aplikasi Surat Bebas Temuan
Sampel Audit/Assessment	:	Website Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Metode Audit/Assesment	:	Active Scanning
Tanggal Audit/Assessment	:	1 Oktober – 31 Oktober 2024
Nama Tim Audit/Assessment	:	Tim Pelaksana Teknis Keamanan SPBE Kabupaten Kepulauan Selayar
Hasil Audit/Assessment	:	

I. Identifikasi Jaringan Sistem Elektronik

```
Scanning inspektorat.kepulauanelayarkab.go.id (45.126.43.2) [1000 ports]
Discovered open port 21/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 443/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 143/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 993/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 53/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 587/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 995/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 80/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 110/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 465/tcp on 45.126.43.2
Completed Connect Scan at 21:26, 21.16s elapsed (1000 total ports)
```

Identifikasi Open Port pada Jaringan Website Inspektorat

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik	:	Sistem Elektronik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
Domain Name System	:	kepulauanelayarkab.go.id
Sub Domain Name System	:	a. putr.kepulauanelayarkab.go.id b. patroltaru.kepulauanelayarkab.go.id
Nama Aplikasi	:	Web Aplikasi Pantau dan Kontrol Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar
Metode Audit/Assesment	:	Active Scanning Active Open Source Intelligent (OSINT)
Tanggal Audit/Assessment	:	1 Oktober – 31 Oktober 2024
Nama Tim Audit/Assessment	:	Tim Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Hasil Audit/Assessment	:	

I. Identifikasi Profil Sistem Elektronik

I.1. Identifikasi Tampilan Sistem Elektronik



Tampilan Laman Home pada Web Aplikasi PATROTARU

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik	:	Sistem Elektronik Dinas Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Selayar
Domain Name System	:	kepulauanelayarkab.go.id
Sub Domain Name System	:	perpustakaan.kepulauanelayarkab.go.id
Nama Aplikasi	:	Website Dinas Perpustakaan Kab. Kepulauan Selayar
Metode Audit/Assesment	:	Active Scanning Active Open Source Intelligent (OSINT)
Tanggal Audit/Assessment	:	2 Desember – 31 Desember 2024
Nama Tim Audit/Assessment	:	Tim Pelaksana Teknis Keamanan SPBE Kabupaten Kepulauan Selayar
Hasil Audit/Assessment	:	

1. Identifikasi Profil Sistem Elektronik

1.1. Identifikasi Tampilan Sistem Elektronik



Tampilan Laman Beranda Website Dinas Perpustakaan & Kearsipan

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik	:	Sistem Elektronik Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Domain Name System	:	kepulauanseyarkab.go.id
Sub Domain Name System	:	bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
Nama Aplikasi	:	Portal Web BPKPD Kab. Kep. Selayar
Metode Audit/Assesment	:	Active Scanning Active Open Source Intelligent (OSINT)
Tanggal Audit/Assessment	:	1 Nopember – 30 Nopember 2024
Nama Tim Audit/Assessment	:	Tim Pelaksana Teknis Keamanan SPBE Kabupaten Kepulauan Selayar
Hasil Audit/Assessment	:	

I. Identifikasi Profil Sistem Elektronik

I.1. Identifikasi Tampilan Sistem Elektronik



SIPD
Sistem Informasi Pemerintah Daerah
KUNJUNGI



SIMPADA
Aplikasi Sistem Manajemen Keuangan
KUNJUNGI



Sambutan

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2024, bertempat di Gedung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, saya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan ini mengucapkan selamat datang dan semoga sukses serta berkah kepada seluruh masyarakat yang mengunjungi dan menggunakan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Manajemen Keuangan (SIMPADA) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Sistem Manajemen Keuangan (SIMPADA) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tampilan Laman Home Portal Web BPKPD



IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN KEAMANAN JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik : Sistem Elektronik Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Domain Name System : kepulauanelayarkab.go.id

Sub Domain Name System : bappelitbangda.kepulauanselayarkab.
go.id

Nama Aplikasi : Website Bappelitbangda Kabupaten
Kepulauan Selayar

Metode Audit/Assesment : Active Scanning

Tanggal Audit/Assessment : 1 Oktober – 31 Oktober 2024

Nama Tim Audit/Assessment : Tim Pelaksana Teknis Keamanan SPBE
Kabupaten Kepulauan Selayar

Hasil Audit/Assessment :

I. Identifikasi Jaringan Sistem Elektronik

```
Scanning bappelitbangda.kepulauanselayarkab.go.id (192.0.78.24) [2 po
Completed Ping Scan at 21:02, 0.06s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:02
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:02, 13.00s elapsed
Initiating Connect Scan at 21:02
Scanning bappelitbangda.kepulauanselayarkab.go.id (192.0.78.24) [1000
Discovered open port 80/tcp on 192.0.78.24
Discovered open port 53/tcp on 192.0.78.24
Discovered open port 443/tcp on 192.0.78.24
Completed Connect Scan at 21:02, 5.12s elapsed (1000 total ports)
Initiating Service scan at 21:02
Scanning 3 services on bappelitbangda.kepulauanselayarkab.go.id (192.
Completed Service scan at 21:02, 21.22s elapsed (3 services on 1 host)
```

Identifikasi Open Port pada Jaringan Website Bappelitbangda

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN KEAMANAN APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik	:	Sistem Elektronik Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Domain Name System	:	kepulauanelayarkab.go.id
Sub Domain Name System	:	bappelitbangda.kepulauanelayarkab. go.id
Nama Aplikasi	:	Website Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar
Metode Audit/Assesment	:	Active Scanning
Tanggal Audit/Assessment	:	1 Oktober - 31 Oktober 2024
Nama Tim Audit/Assessment	:	Tim Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Hasil Audit/Assessment	:	

I. Identifikasi Keamanan Aplikasi



**IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN
KEAMANAN JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK**

Nama Sistem Elektronik	:	Sistem Elektronik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Kepulauan Selayar
Domain Name System	:	kepulauanelayarkab.go.id
Sub Domain Name System	:	a. putr.kepulauanelayarkab.go.id b. patroltaru.kepulauanelayarkab.go.id
Nama Aplikasi	:	a. Website Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang b. Web Aplikasi Pantau dan Kontrol Penataan Ruang
Sampel Audit/Assessment	:	Web Aplikasi Pantau dan Kontrol Penataan Ruang
Metode Audit/Assesment	:	Active Scanning
Tanggal Audit/Assessment	:	1 Oktober – 31 Oktober 2024
Nama Tim Audit/Assessment	:	Tim Pelaksana Teknis Keamanan SPBE Kabupaten Kepulauan Selayar
Hasil Audit/Assessment	:	

BAGIAN KETIGA
KEAMANAN JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik : Sistem Elektronik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kab.
Kepulauan Selayar

Domain Name System : kepulauanelayarkab.go.id

Sub Domain Name System : bpbd.kepulauanelayarkab.go.id

Nama Aplikasi : Website BPBD Kab. Kepulauan Selayar

Metode Audit/Assesment : Active Scanning

Tanggal Audit/Assessment : 2 September – 30 September 2024

Nama Tim Audit/Assessment : Tim Pengamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Hasil Audit/Assessment :

I. Identifikasi Jaringan Sistem Elektronik

```
Scanning bpbd.kepulauanelayarkab.go.id (45.126.43.2) [2 ports]
Completed Ping Scan at 23:45, 0.25s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 23:45
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 23:45, 7.61s elapsed
Initiating Connect Scan at 23:45
Scanning bpbd.kepulauanelayarkab.go.id (45.126.43.2) [1000 ports]
Discovered open port 995/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 21/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 443/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 993/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 587/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 143/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 80/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 53/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 110/tcp on 45.126.43.2
Discovered open port 465/tcp on 45.126.43.2
Completed Connect Scan at 23:46, 10.86s elapsed (1000 total ports)
```

Identifikasi Open Port pada Jaringan Website BPBD

BAGIAN KETIGA

IDENTIFIKASI KEAMANAN JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik	:	Sistem Elektronik Dinas Sosial Kab. Kepulauan Selayar
Domain Name System	:	kepulauanelayarkab.go.id
Sub Domain Name System	:	dinsos.kepulauanelayarkab.go.id
Nama Aplikasi	:	Website Dinas Sosial Kab. Kepulauan Selayar
Metode Audit/Assesment	:	Active Scanning
Tanggal Audit/Assessment	:	2 September – 30 September 2024
Nama Tim Audit/Assessment	:	Tim Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Hasil Audit/Assessment	:	

I. Identifikasi Jaringan Sistem Elektronik

```
Scanning dinsos.kepulauanelayarkab.go.id (43.252.237.34) [4 ports]
Completed Ping Scan at 11:17, 0.20s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 11:17
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 11:17, 0.44s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 11:17
Scanning dinsos.kepulauanelayarkab.go.id (43.252.237.34) [1000 ports]
Discovered open port 53/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 110/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 143/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 587/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 80/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 995/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 21/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 22/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 993/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 443/tcp on 43.252.237.34
Completed SYN Stealth Scan at 11:17, 10.69s elapsed (1000 total ports)
Initiating Service scan at 11:17
Scanning 10 services on dinsos.kepulauanelayarkab.go.id (43.252.237.34)
Completed Service scan at 11:17, 23.31s elapsed (10 services on 1 host)
```

Identifikasi Open Port pada Jaringan Website Dinas Sosial

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik	:	Sistem Elektronik Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar
Domain Name System	:	kepulauanelayarkab.go.id
Sub Domain Name System	:	dikbud.kepulauanelayarkab.go.id
Nama Aplikasi	:	Website Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar
Metode Audit/Assessment	:	Active Scanning Active Open Source Intelligent
Tanggal Audit/Assessment	:	3 Juni - 29 Juni 2024
Nama Tim Audit/Assessment	:	Tim Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Hasil Audit/Assessment	:	

BAGIAN KETIGA

IDENTIFIKASI KEAMANAN JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik	: Sistem Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar – Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Domain Name System	: kepulauanelayarkab.go.id
Sub Domain Name System	: 1. silajara.kepulauanselayarkab.go.id 2. lpse.kepulauanselayarkab.go.id
Nama Aplikasi	: 1. Sistem Layanan Informasi Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Kepulauan Selayar (SILAJARA) 2. Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Kepulauan Selayar
Metode Audit/Assesment	: Active Scanning
Tanggal Audit/Assessment	: 2 Januari – 30 Desember 2024
Nama Tim Audit/Assessment	: Tim Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Hasil Audit/Assessment	:

3.1 Identifikasi Jaringan Sistem Elektronik

3.1.1 Identifikasi Jaringan Web Aplikasi SILAJARA

```
Scanning silajara.kepulauanselayarkab.go.id (103.163.161.34) [4 ports]
Completed Ping Scan at 09:16, 0.06s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host: at 09:16
Completed Parallel DNS resolution of 1 host: at 09:17, 16.56s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 09:17
```

BAGIAN KEDUA IDENTIFIKASI SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik	:	Sistem Elektronik Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Kepulauan Selayar
Domain Name System	:	kepulauanelayarkab.go.id
Sub Domain Name System	:	1. bkd.kepulauanelayarkab.go.id ; apel.bkd.kepulauanelayarkab.go.id; pangkat.bkd.kepulauanelayarkab.go.id; satya.bkd.kepulauanelayarkab.go.id; pengaduan.bkd.kepulauanelayarkab.go.id simpole.bkd.kepulauanelayarkab.go.id dilan.bkd.kepulauanelayarkab.go.id; sipeka.bkd.kepulauanelayarkab.go.id; tubel.bkd.kepulauanelayarkab.go.id 2. simpeg.kepulauanelayarkab.go.id 3. ekinerja.kepulauanelayarkab.go.id
Nama Aplikasi	:	1. Website BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2. Portal Web BKPSDM Kab. Kepulauan Selayar 3. Sistem Informasi Pensiun Online 4. Web Aplikasi Absensi Pegawai Elektronik 5. Sistem Informasi Kenaikan Pangkat 6. Web Aplikasi Satya Lencana 7. Sistem Informasi Pemberkasan ASN 8. Sistem Informasi SUKSES 9. Sistem Informasi Pengaduan 10. Sistem Informasi Kepegawaian Kab. Kep. Selayar
Sampel Audit/Assessment	:	1. Website BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar 2. SIMPEG Kabupaten Kepulauan Selayar

R A H A S I A

Metode Audit/Assesment : Active Scanning
Active Open Source Intelligent (OSINT)

Tanggal Audit/Assessment : 1 Januari – 29 Desember 2023

Nama Tim Audit/Assessment : Tim Pengamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Hasil Audit/Assessment :

2.1 Identifikasi Profil Sistem Elektronik

2.1.1 Identifikasi Tampilan Sistem Elektronik



Tampilan Portal Web BKPSDM



Tampilan laman Login SIMPEG Kab. Kepulauan Selayar

BAGIAN KEDUA

IDENTIFIKASI SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik	:	Sistem Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar – Bagian Hukum
Domain Name System	:	kepulauanelayarkab.go.id
Sub Domain Name System	:	jdih.kepulauanelayarkab.go.id
Nama Aplikasi	:	Web Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab Kepulauan Selayar
Metode Audit/Assesment	:	Active Scanning
Tanggal Audit/Assessment	:	1 Februari – 29 Februari 2024
Nama Tim Audit/Assessment	:	Tim Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Hasil Audit/Assessment	:	

I. Identifikasi Profil Sistem Elektronik

I.1. Identifikasi Tampilan Sistem Elektronik



**Tampilan Laman Beranda Web Aplikasi JDIH
Kabupaten Kepulauan Selayar**

R A H A S I A

BAGIAN KEDUA **IDENTIFIKASI SISTEM ELEKTRONIK**

Nama Sistem Elektronik	: Sistem Elektronik Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Kepulauan Selayar
<i>Domain Name System</i>	: kepulauanelayarkab.go.id
<i>Sub Domain Name System</i>	: a. pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id; b. itourism.pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id
Nama Aplikasi	: 1. Website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar; 2. Web Aplikasi Selayar Heavenly Park Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Metode Audit/Assessment	: Active Scanning
Tanggal Audit/Assessment	: 1 Agustus – 30 Agustus 2024
Nama Tim Audit/Assesement	: Tim Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Hasil Audit/Assessment	:

BAGIAN KETIGA

IDENTIFIKASI KEAMANAN JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik	:	Sistem Elektronik Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Selayar
Domain Name System	:	kepulauanelayarkab.go.id
Sub Domain Name System	:	dinkes.kepulauanelayarkab.go.id
Nama Aplikasi	:	Website Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Metode Audit/Assesment	:	Active Scanning
Tanggal Audit/Assessment	:	3 Juli – 31 Juli 2023
Nama Tim Audit/Assessment	:	Tim Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Hasil Audit/Assessment	:	

I. Identifikasi Jaringan Sistem Elektronik

```

Scanning dinkes.kepulauanelayarkab.go.id (46.17.173.171) [4 ports]
Completed Ping Scan at 06:22, 0.09s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 06:22
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 06:22, 0.72s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 06:22
Scanning dinkes.kepulauanelayarkab.go.id (46.17.173.171) [1000 ports]
Discovered open port 80/tcp on 46.17.173.171
Discovered open port 3306/tcp on 46.17.173.171
Discovered open port 993/tcp on 46.17.173.171
Discovered open port 995/tcp on 46.17.173.171
Discovered open port 143/tcp on 46.17.173.171
Discovered open port 587/tcp on 46.17.173.171
Discovered open port 21/tcp on 46.17.173.171
Discovered open port 443/tcp on 46.17.173.171
Discovered open port 110/tcp on 46.17.173.171
Discovered open port 465/tcp on 46.17.173.171
Completed SYN Stealth Scan at 06:23, 4.89s elapsed (1000 total ports)
Initiating Service scan at 06:23
Scanning 10 services on dinkes.kepulauanelayarkab.go.id (46.17.173.171)

```

Identifikasi Open Port pada Jaringan Website Dinas Kesehatan

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN KEAMANAN JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Nama Sistem Elektronik	:	Sistem Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar – Bagian Organisasi
Domain Name System	:	kepulauanelayarkab.go.id
Sub Domain Name System	:	sibija.kepulauanelayarkab.go.id
Nama Aplikasi	:	Aplikasi Akuntabilitas Kinerja (ASSIBIJA)
Metode Audit/Assessment	:	Active Scanning
Tanggal Audit/Assessment	:	1 Maret – 28 Maret 2024
Nama Tim Audit/Assessment	:	Tim Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Hasil Audit/Assessment	:	

I. Identifikasi Jaringan Sistem Elektronik

```
Scanning sibija.kepulauanelayarkab.go.id (43.252.237.34) [1000 ports]
Discovered open port 53/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 80/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 993/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 21/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 110/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 587/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 443/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 143/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 995/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 22/tcp on 43.252.237.34
Discovered open port 465/tcp on 43.252.237.34
Completed SYN Stealth Scan at 09:30, 9.85s elapsed (1000 total ports)
Initiating Service scan at 09:30
Scanning 11 services on sibija.kepulauanelayarkab.go.id (43.252.237.34)
Completed Service scan at 09:31, 29.22s elapsed (11 services on 1 host)
Initiating OS detection (try #1) against sibija.kepulauanelayarkab.go.id (43.252.237.34)
Retrying OS detection (try #2) against sibija.kepulauanelayarkab.go.id (43.252.237.34)
Initiating Traceroute at 09:31
Completed Traceroute at 09:31, 3.00s elapsed
```

Identifikasi Open Port pada Jaringan Aplikasi ASSIBIJA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

JUMLAH TITIK TERAMANKAN

TAHUN 2024

No.	PERANGKAT DAERAH
1.	SEKRETARIAT DAERAH
2.	DPRD
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.	DINAS KESEHATAN
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN
9.	DINAS SOSIAL
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11.	DINAS PERTANIAN
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14.	DINAS PERHUBUNGAN
15.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
17.	DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
18.	DINAS PERIKANAN
19.	DINAS KEPARIWISATAAN
20.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
21.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
22.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
23.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
25.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
28.	KECAMATAN BONTOMATENE
29.	KECAMATAN BONTOMANAI
30.	KECAMATAN BUKI
31.	KECAMATAN BENTENG
32.	KECAMATAN BONTOHARU
33.	KECAMATAN BONTOSIKUYU
34.	KECAMATAN PASIMASUNGGU
35.	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR
36.	KECAMATAN PASIMARANNU
37.	KECAMATAN PASILAMBENA
38.	KECAMATAN TAKABONERATE

Benteng, 25 Januari 2025

plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

DATA KOMPILASI STATISTIK SEKTORAL YANG DILAKUKAN TAHUN 2024

No.	Perangkat Daerah
1.	Kompilasi Data Bagian Hukum Setda
2.	Kompilasi Data Bagian Pemerintahan setda
3.	Kompilasi Data Sekretariat DPRD
4.	Kompilasi Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.	Kompilasi Data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
6.	Kompilasi Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
7.	Kompilasi Data Dinas Perikanan
8.	Kompilasi Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9.	Kompilasi Data Dinas Kesehatan
10.	Kompilasi Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11.	Kompilasi Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12.	Kompilasi Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Kompilasi Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
14.	Kompilasi Data Dinas Perhubungan
15.	Kompilasi Data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
16.	Kompilasi Data Dinas Lingkungan Hidup
17.	Kompilasi Data Dinas Sosial
18.	Kompilasi Data Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
19.	Kompilasi Data Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

20.	Kompilasi Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21.	Kompilasi Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23.	Kompilasi Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.,M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

METADATA KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2024

No.	Perangkat Daerah	Kegiatan Statistik Sektoral
1	Dinas Perikanan	1. Kompromin Rumah Tangga Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar
		2. Kompromin Sumber Daya Ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar
		3. Pencacahan Lengkap Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar
		4. Pencacahan Lengkap Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar
		5. Pencacahan Lengkap Rumah Tangga Perikanan Budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar
		6. Survey Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar
		7. Survey Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar
2	Dinas Kesehatan	8. Kompilasi Produk Administrasi Pelayanan Kesehatan Bayi
		9. Kompilasi Produk Administrasi Ketersediaan Obat Esensial
		10. Kompilasi Produk Administrasi Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas
		11. Kompilasi Produk Administrasi Layanan Kesehatan Usia Lanjut
		12. Kompilasi Produk Administrasi Layanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular
3	Dinas Pariwisata	13. Penyusunan Data Kunjungan Wisatawan
4	Dinas Perhubungan	14. Kompilasi Produk Administrasi Tambatan Perahu
5	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	15. Kompilasi Produk Administrasi Pencari Kerja
6	Dinas PU	16. Kompilasi Produk Adminitrasi Data Kondisi Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar
7	Dinas Sosial	17. Produk Kompilasi Administrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

		18. Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	19. Kompilasi Produk Administrasi Rumah Khusus di Desa Laiyolo, Dewa Lowa dan Desa Majapahit
		20. Kompilasi Produk Administrasi Rumah Lokasi Rawan Bencana di Desa Tambolongan
		21. Kompilasi Produk Administrasi Rumah Sewa di Kelurahan Bontobangun, Kelurahan Putabangun, Desa Parak
9	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	22. Survey Pemantauan Harga Eceran Kebutuhan Pokok Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024
		23. Kompromin Koperasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24. Kompromin Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25. Kompromin Data Kelembagaan Petani Kab Kepulauan Selayar
		26. Kompilasi Produk Administrasi Data Populasi dan Pemotongan Ternak Kab. Kepulauan Selayar
		27. Kompilasi Produk Administrasi Data Curah Hujan Kabupaten Kepulauan Selayar
		28. Kompilasi Produk Administrasi Laporan Pelayanan Kesehatan Hewan
		29. Kompromin Serangan OPT Tanaman Petani
		30. Kompromin Data Penyuluh Pertanian
		31. Kompromin Data Sarana Pertanian
		32. Kompromin Data Harga Pangan Strategis
		33. Kompilasi Produk Administrasi Laporan Luas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
		34. Kompromin Peta Kerawan Pangan
		35. Kompromin Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

METADATA INDIKATOR STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2024

No.	Perangkat Daerah	Metadata Kegiatan	Metadata Indikator
1.	Dinas Perikanan	1. Kompromin Rumah Tangga Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar	1. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap
		2. Kompromin Sumber Daya Ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar	1. Jumlah Nelayan 2. Jumlah Armada Nelayan 3. Jumlah Alat Tangkap Nelayan
		3. Pencacahan Lengkap Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar	1. Jumlah Pembudidaya 2. Luas Lahan Budidaya
		4. Pencacahan Lengkap Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar	1. Jumlah Produksi Menurut Olahan Hasil Perikanan 2. Jumlah Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
		5. Pencacahan Lengkap Rumah Tangga Perikanan Budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar	1. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya
		6. Survey Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar	1. Jumlah produksi perikanan budidaya menurut jenis ikan budidaya 2. Jumlah produksi perikanan budidaya menurut jenis pembesaran
		7. Survey Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar	1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
2.	Dinas Kesehatan	1. Kompilasi Produk Administrasi Pelayanan Kesehatan Bayi	Kosong
		2. Kompilasi Produk Administrasi Ketersediaan Obat Esensial	Kosong

		3. Kompilasi Produk Administrasi Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas	Kosong
		4. Kompilasi Produk Administrasi Layanan Kesehatan Usia Lanjut	Kosong
		5. Kompilasi Produk Administrasi Layanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Kosong
3.	Dinas Pariwisata	1. Penyusunan Data Kunjungan Wisatawan	1. Jumlah Wisatawan ke Kepulauan Selayar
4.	Dinas Perhubungan	1. Kompilasi Produk Administrasi Tambatan Perahu	Kosong
5.	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	1. Kompilasi Produk Administrasi Pencari Kerja	1. Jumlah Pencari Kerja
6.	Dinas PU	1. Kompilasi Produk Administrasi Data Kondisi Jalan Kabupaten Kepulauan Selayar	1. Panjang Jalan
7.	Dinas Sosial	1. Produk Kompilasi Administrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	1. Jumlah Usulan Masuk DTKS 2. Jumlah Usulan Menerima Bansos 3. Jumlah Usulan ketidaklayakan data penerima bansos
		2. Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Sosial
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1. Kompilasi Produk Administrasi Rumah Khusus di Desa Laiyolo, Dewa Lowa dan Desa Majapahit	1. Jumlah Unit 2. Jumlah Total Penghuni 3. Keterisian 4. Kondisi Bangunan 5. Rumah lainnya
		2. Kompilasi Produk Administrasi Rumah Lokasi Rawan Bencana di Desa Tambolongan	1. Luas Perumahan di kelurahan/desa berdasarkan rawan bencana 2. Jumlah rumah di kelurahan/desa berdasarkan rawan bencana 3. Jumlah KK di kelurahan/desa berdasarkan rawan bencana 4. Jumlah jiwa di kelurahan/desa berdasarkan rawan bencana 5. Kondisi fisik rumah di kelurahan berdasarkan rawan bencana 6. Status kepemilikan rumah di kelurahan/desa berdasarkan rawan bencana

		3. Kompilasi Produk Administrasi Rumah Sewa di Kelurahan Bontobangun, Kelurahan Putabangun, Desa Parak	1. Jumlah Unit 2. Jumlah Total Kapasitas Kamar 3. Keterisian 4. Kondisi Bangunan 5. Tarif Rata-Rata
9.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1. Survey Pemantauan Harga Eceran Kebutuhan Pokok Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	1. Rata-rata Harga Bahan Pokok
		2. Kompromin Koperasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	1. Jumlah Koperasi
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Kompromin Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023	1. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin 2. Kepadatan Penduduk 3. Pertumbuhan Penduduk 4. Jumlah Penduduk menurut Kelompok umur dan Jenis Kelamin 5. Proporsi Penduduk menurut kelompok umur dan Jenis kelamin 6. Umur Median Menurut Kecamatan 7. Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan 8. Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur 9. Rasio Ketergantungan menurut kecamatan 10. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan kelompok umur 11. Proporsi Penduduk menurut Kecamatan dan status Perkawinan 12. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan status Perkawinan 13. Jumlah keluarga berdasarkan kecamatan 14. Rata-rata Anggota keluarga berdasarkan kecamatan 15. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin 16. Proporsi penduduk berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin 17. Proporsi penduduk berdasarkan Kecamatan dan Agama 18. Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan Agama

			19. Jumlah penduduk berdasarkan golongan darah dan jenis kelamin 20. Proporsi penduduk berdasarkan golongan darah dan jenis kelamin 21. Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kecacatan 22. Proporsi penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kecacatan 23. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kecacatan dan jenis kelamin 24. Proporsi penduduk berdasarkan jenis kecacatan dan jenis kelamin 25. Jumlah Kepemilikan Kartu keluarga Menurut Kecamatan 26. proporsi kepemilikan Kartu Keluarga menurut kecamatan 27. Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan kecamatan 28. Proporsi kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan kecamatan 29. Jumlah kepemilikan akta kelahiran berdasarkan kecamatan 30. Proporsi kepemilikan akta kelahiran berdasarkan kecamatan 31. Jumlah kepemilikan akta kelahiran penduduk berusia 0-17 tahun berdasarkan kecamatan 32. Proporsi kepemilikan akta kelahiran penduduk berusia 0-17 tahun berdasarkan kecamatan 33. Jumlah kepemilikan akta perkawinan berdasarkan kecamatan 34. proporsi kepemilikan akta perkawinan berdasarkan kecamatan 35. Jumlah kepemilikan akta perceraian berdasarkan kecamatan 36. Proporsi kepemilikan akta perceraian berdasarkan kecamatan 37. Jumlah Pencetakan Akta Kelahiran 38. Jumlah Pencetakan Akta Perikawinan
--	--	--	---

			39. Jumlah Pencetakan Akta Kematian 40. Jumlah Pencetakan Kartu Keluarga 41. Jumlah Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) 42. Jumlah Perekaman KTP elektronik 43. Jumlah Pencetakan KTP Elektronik
11.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. Kompromin Data Kelembagaan Petani Kab Kepulauan Selayar	1. Jumlah kelembagaan petani
		2. Kompilasi Produk Administrasi Data Populasi dan Pemotongan Ternak Kab. Kepulauan Selayar	1. Total produksi ternak 2. Total populasi ternak
		3. Kompilasi Produk Administrasi Data Curah Hujan Kabupaten Kepulauan Selayar	1. Rata Rata Curah Hujan
		4. Kompilasi Produk Administrasi Laporan Pelayanan Kesehatan Hewan	1. Jumlah kasus penyakit ternak berdasarkan jenis ternak
		5. Kompromin Serangan OPT Tanaman Petani	1. Luas serangan Total
		6. Kompromin Data Penyuluh Pertanian	1. Jumlah penyuluh berdasarkan jenjang jabatan
		7. Kompromin Data Sarana Pertanian	1. Jumlah Alsintan berdasarkan jenis 2. Jumlah pupuk berdasarkan jenis 3. Jumlah Pestisida berdasarkan jenis 4. Jumlah Bibit/benih berdasarkan jenis
		8. Kompromin Data Harga Pangan Strategis	1. Rata-rata harga pangan strategis
		9. Kompilasi Produk Administrasi Laporan Luas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	1. Produktivitas tanaman hortikultura dan Perkebunan 2. Jumlah total produksi tanaman hortikultura
		10. Kompromin Peta Kerawan Pangan	1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih (beras + jagung + ubi kayu + ubi jalar + sagu + stok) 2. Persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan

			3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran 4. Persentase rumah tangga tanpa akses Listrik 5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga Kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk 8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting) 9. Angka harapan hidup pada saat lahir
		11. Kompromin Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1. Persentase luas tanam komoditas pangan 2. Persentase luas puso komoditas pangan 3. Persentase rata-rata harga pangan 4. Persentase balita underweight
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Kompilasi produk Administrasi Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan KB	1. Jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Kepulauan Selayar 2. Jumlah Pasangan Usia Subur di Kabupaten Kepulauan Selayar 3. Jumlah alat kontrasepsi pada fasilitas kesehatan dan jejaringnya

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.,M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

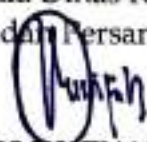
**JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES
INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

No.	PERANGKAT DAERAH	SUMBER PEMBIAYAAN DARI KOMINFO		KETERANGAN
		Disediakan	Belum Disediakan	
1.	SEKRETARIAT DAERAH	√		Pembiayaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah di DPA
2.	DPRD	√		
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN	√		
4.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	√		
5.	DINAS KESEHATAN	√		
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	√		
7.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	√		
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN	√		
9.	DINAS SOSIAL	√		
10.	DINAS PERTANIAN	√		
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	√		
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	√		
13.	DINAS PERHUBUNGAN	√		
14.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	√		

15.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	√		
16.	DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN	√		
17.	DINAS PERIKANAN	√		
18.	DINAS KEPARIWISATAAN	√		
19.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	√		
20.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	√		
21.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	√		
22.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	√		
23.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	√		
24.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	√		
25.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	√		
26.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	√		

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



HJ. ANDI DWITYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata TK. 1
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

JUMLAH PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No.	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2.	DPRD	
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN	
4.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
5.	DINAS KESEHATAN	
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
7.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMTAN	
9.	DINAS SOSIAL	
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
11.	DINAS PERTANIAN	
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
14.	DINAS PERHUBUNGAN	
15.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
16.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
17.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
18.	DINAS PERIKANAN	
19.	DINAS KEPARIWISATAAN	
20.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
21.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
22.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
23.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	

24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
25.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
26.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
27.	KECAMATAN BONTOMATENE	
28.	KECAMATAN BONTOMANAI	
29.	KECAMATAN BUKI	
30.	KECAMATAN BENTENG	
31.	KECAMATAN BONTOHARU	
32.	KECAMATAN BONTOSIKUYU	
33.	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
34.	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR	
35.	KECAMATAN PASIMARANNU	
36.	KECAMATAN PASILAMBENA	
37.	KECAMATAN TAKABONERATE	

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,


Hj. AND DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata TK. 1
NIP. 19760502 201407 2 002



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk mensinergikan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam menyelesaikan isu strategis daerah guna mendorong peningkatan daya saing daerah, perlu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah yang tergabung dengan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah, Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD, Tipe C;
 - c. Inspektorat Daerah, Tipe A;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 - b. Dinas Kesehatan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 - f. Dinas Sosial, tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. Dinas Perhubungan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
- o. Dinas Perikanan, tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;

- q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - r. Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
 - s. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pengkajian, dan penerapan serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
- (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Kecamatan Bontomatene dengan tipe A;

- b. Kecamatan Buki dengan tipe A;
- c. Kecamatan Bontomanai dengan tipe A;
- d. Kecamatan Benteng dengan tipe A;
- e. Kecamatan Bontoharu dengan tipe A;
- f. Kecamatan Bontosikuyu dengan tipe A;
- g. Kecamatan Pasimasunggu dengan tipe A;
- h. Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan tipe A;
- i. Kecamatan Taka Bonerate dengan tipe A;
- j. Kecamatan Pasimarannu dengan tipe A; dan
- k. Kecamatan Pasilambena dengan tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 27 Desember 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
TTD
MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD
MESDIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023
NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM,


Drs. MULYATI, M.M.Pub.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19681018 198903 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.09.135.23



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

PERSENTASE JUMLAH NILAI PER AREA KEMANAN INFORMASI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

TAHUN	TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH		CAPAIAN %	KETERANGAN
	Jumlah nilai per area keamanan informasi	Jumlah area penilaian		
2024	684	918	74,50	Rincian Indeks KAMI Terlampir

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,

Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.,M.M.
Pangkat. Penata TK. 1
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**JUMLAH LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE
DAN TERINTEGRASI
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

No	Perangkat Daerah	Layanan Publik secara online dan terintegrasi	Sub layanan Publik	Keterangan
1.	Bagian Pengadaan barang dan Jasa SETDA	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Data Terlampir
3.	Dinas Penanaman Modal	Layanan Perizinan	1. Izin Usaha Mikro Kecil 2. Izin Usaha Menengah dan Besar 3. OSS	
4.	BPBD	Layanan Sebaran Daerah Rawan Bencana	Layanan Sebaran Daerah Rawan Bencana	
5.	BPKAD	Layanan Keuangan	Layanan Keuangan	
6.	Inspektorat Kabupaten	Layanan Pengaduan Masyarakat	Layanan Pengaduan Masyarakat	
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Perpustakaan Elektronik	Layanan Perpustakaan Elektronik	
8.	RSUD KH Hayyung	Layanan Antrian Online	Layanan Antrian Online	

10.	Bagian Hukum Setda	Layanan Informasi Dokumen Peraturan Perundang-undangan	Layanan Informasi Dokumen Peraturan Perundang-undangan	
11.	BKPSDM	Layanan Kepegawaian	1. Layanan Evaluasi Kinerja Pegawai 2. Layanan APÊL 3. Layanan Kepegawaian 4. Layanan Absensi	
12.	DiskoinfoSP	Layanan Informasi Publik	1. Layanan Informasi Publik (PPID) 2. Layanan Tanda Tangan Elektronik 3. Layanan Pengaduan	

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.,M.M.
Pangkat. Penata TK. 1
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

JUMLAH LAYANAN PUBLIK SECARA ONLINE
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

No	Perangkat Daerah	Layanan Publik secara online dan terintegrasi	Keterangan
1.	Bagian Pengadaan barang dan Jasa SETDA	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-
3.	Dinas Penanaman Modal	Layanan Perizinan	
4.	BPBD	Layanan Sebaran Daerah Rawan Bencana	
5.	BPKAD	Layanan Keuangan	
6.	Inspektorat Kabupaten	Layanan Pengaduan Masyarakat	
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Perpustakaan Elektronik	
8.	RSUD KH Hayyung	Layanan Antrian Online	
9.	Puskesmas Benteng	Layanan Antrian Online	
10.	Bagian Hukum Setda	Layanan Informasi Dokumen Peraturan Perundang-undangan	
11.	BKPSDM	Layanan Kepegawaian	
12.	DiskoinfoSP	Layanan Informasi Publik	

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.,M.M.

Pangkat. Penata TK. 1

NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

JUMLAH LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE
DAN TERINTEGRASI
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

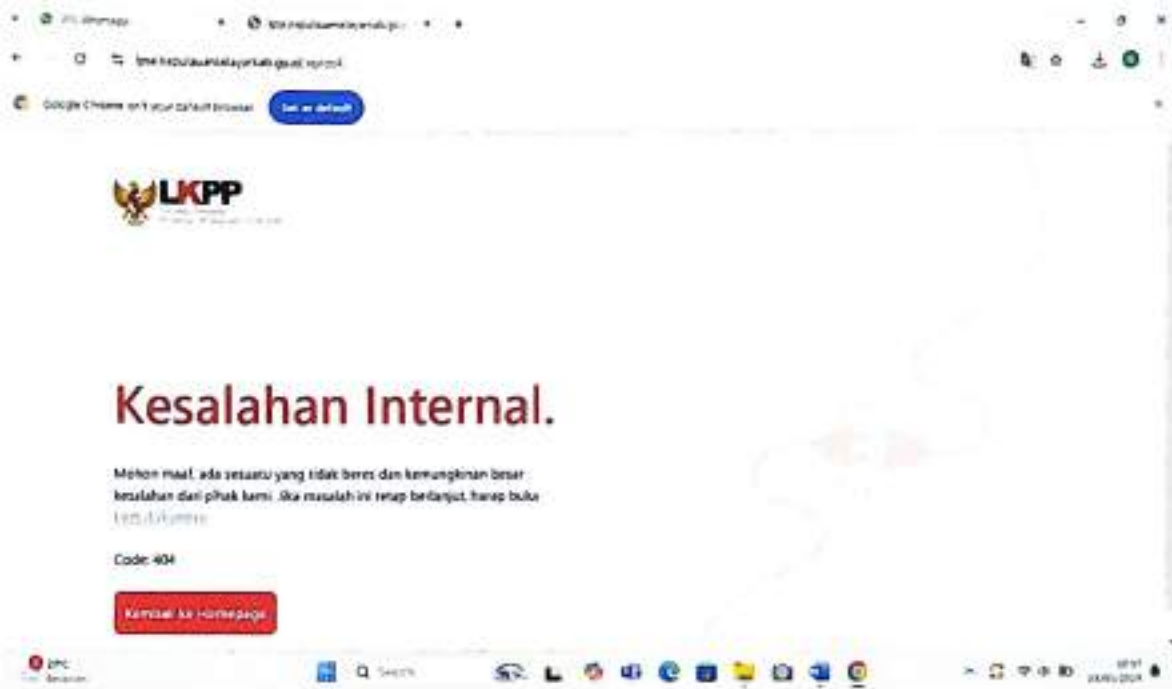
No	Perangkat Daerah	Layanan Publik secara online dan terintegrasi	Sub layanan Publik	Keterangan
1.	Bagian Pengadaan barang dan Jasa SETDA	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Data Terlampir
3.	Dinas Penanaman Modal	Layanan Perizinan	1. Izin Usaha Mikro Kecil 2. Izin Usaha Menengah dan Besar 3. OSS	
4.	BPBD	Layanan Sebaran Daerah Rawan Bencana	Layanan Sebaran Daerah Rawan Bencana	
5.	BPKAD	Layanan Keuangan	Layanan Keuangan	
6.	Inspektorat Kabupaten	Layanan Pengaduan Masyarakat	Layanan Pengaduan Masyarakat	
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Perpustakaan Elektronik	Layanan Perpustakaan Elektronik	
8.	RSUD KH Hayyung	Layanan Antrian Online	Layanan Antrian Online	

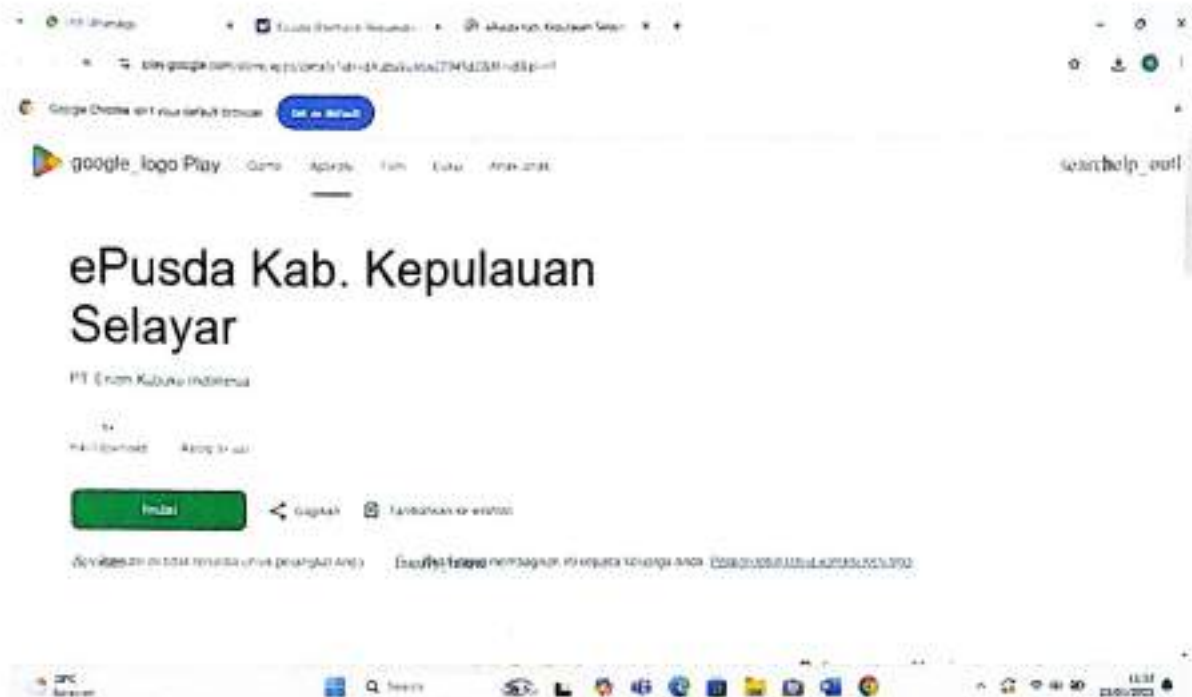
9.	Puskesmas Benteng	Layanan Antrian Online	Layanan Antrian Online	
10.	Bagian Hukum Setda	Layanan Informasi Dokumen Peraturan Perundang-undangan	Layanan Informasi Dokumen Peraturan Perundang-undangan	
11.	BKPSDM	Layanan Kepegawaian	1. Layanan Evaluasi Kinerja Pegawai 2. Layanan APEL 3. Layanan Kepegawaian 4. Layanan Absensi	
12.	DiskoinfoSP	Layanan Informasi Publik	1. Layanan Informasi Publik (PPID) 2. Layanan Tanda Tangan Elektronik 3. Layanan Pengaduan	

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.,M.M.
Pangkat. Penata TK. 1
NIP. 19760502 201407 2 002







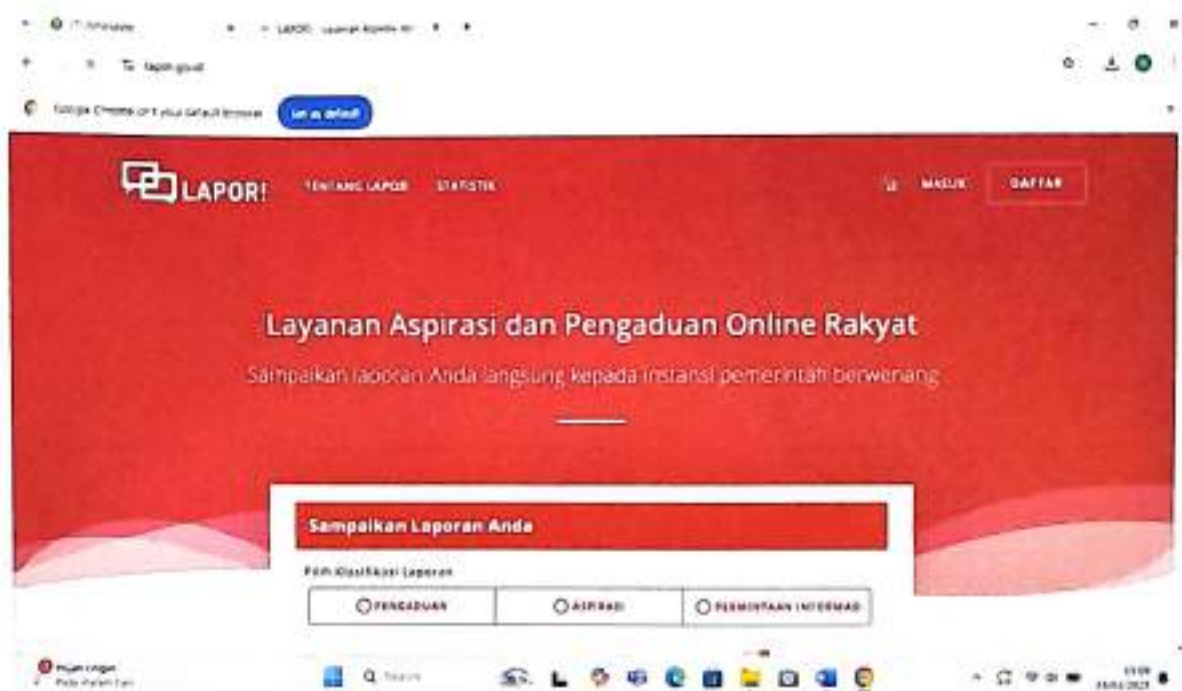


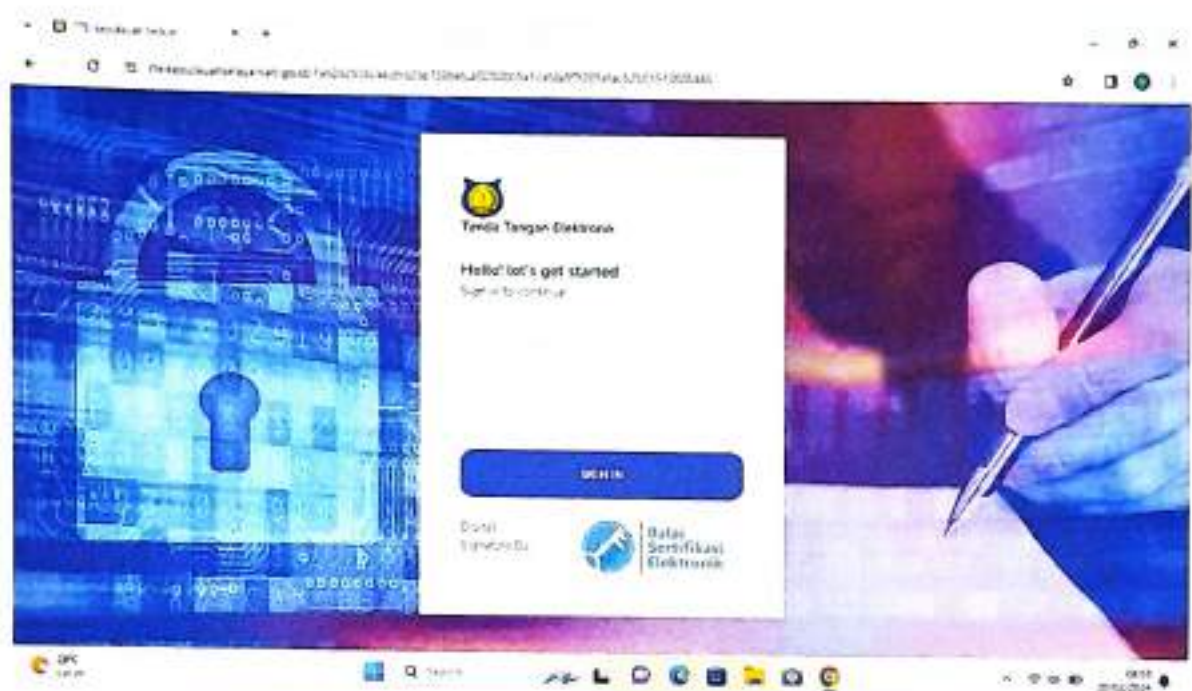
APLIKASI JKN MOBILE

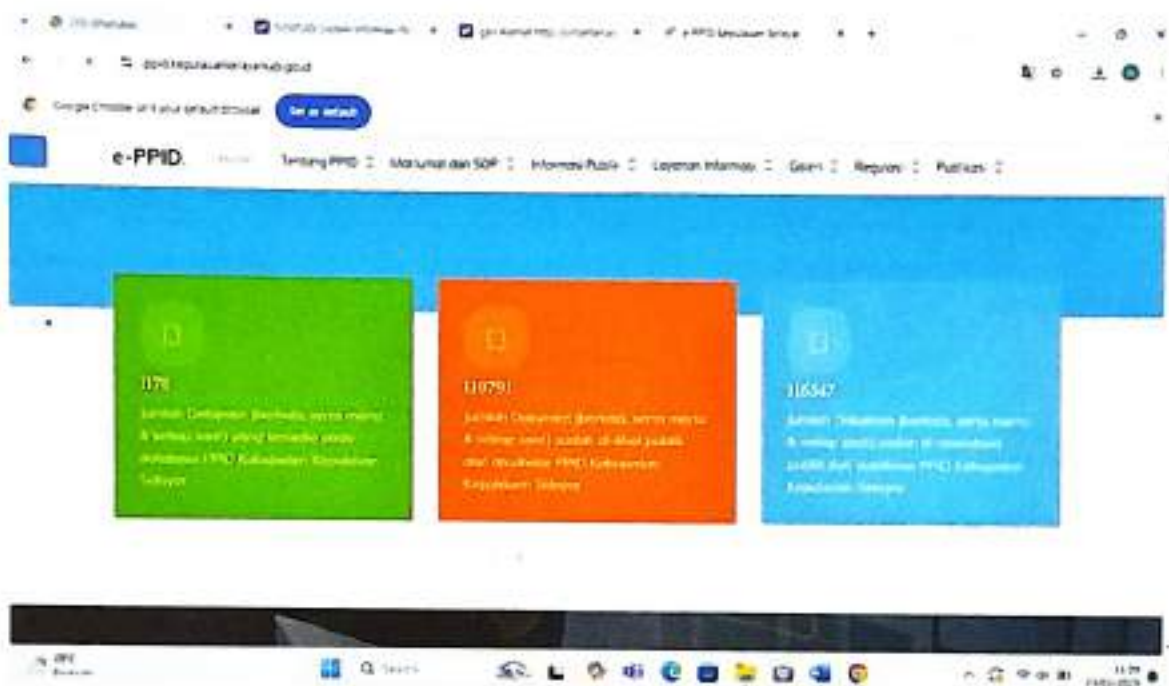
Akses Kesehatan Anda dengan Mudah dan Cepat
Unduh JKN Mobile sekarang juga, pilih aplikasi
sesuai tipe handphone Anda

ANDROID

IPHONE











**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**JUMLAH PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN YANG MENJADI SASARAN
INFORMASI PUBLIK
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	Keterangan
1.	BENTENG	17.041	-
2.	PASIMASUNGGU TIMUR	10.684	
3.	BONTOHARU	9.136	
4.	BONTOMATENE	9.649	
5.	BONTOMANAI	11.072	
6.	BONTOSIKUYU	6.608	
7.	PASIMASUNGGU	7.732	
8.	PASIMARANNU	10.254	
9.	TAKABONERATE	6.040	
10.	PASILAMBENA	5.854	
11.	BUKI	4.353	
JUMLAH		98.605	

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian,

Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.

Pangkat. Penata TK. 1

NIP. 19760502 201407 2 002

**JUMLAH PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN
DATA SEMSTER II TAHUN 2024**

NO.	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR 15-64 TAHUN		JUMLAH
		Lk	Pr	
1	2	3	4	
1	BENTENG	8.223	8.818	17.041
2	BONTOHARU	5.284	5.400	10.684
3	BONTOMATENE	4.390	4.746	9.136
4	BONTOMANAI	4.799	4.850	9.649
5	BONTOSIKUYU	5.524	5.548	11.072
6	PASIMASUNGGU	3.215	3.393	6.608
7	PASIMARANNU	3.812	3.920	7.732
8	TAKA BONERATE	5.134	5.120	10.254
9	PASILAMBENA	2.965	3.075	6.040
10	PASIMASUNGGU TIMUR	2.860	2.994	5.854
11	BUKI	2.230	2.305	4.535
JUMLAH		48.436	50.169	98.605



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**JUMLAH PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN YANG MENJADI SASARAN
PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
DI KAB KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

No	Media Penyebaran Informasi Publik	Jenis Media	Jumlah penduduk	Keterangan
1.	Online	- Instagram - Facebook - Website Pemkab Selayar kepulauanelayarkab.go.id	20.977 orang (90 hari terakhir) 44.580 orang (28 hari terakhir) 71.106 Pembaca	

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian,


Hj. AND DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.,M.M.
Pangkat. Penata TK. 1
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**JUMLAH PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN YANG MENJADI SASARAN
PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
DI KAB KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

No	Media Penyebaran Informasi Publik	Jenis Media	Jumlah penduduk	Keterangan
1.	Online	- Instagram - Facebook - Website Pemkab Selayar kepulauanelayarkab.go.id	20.977 orang (90 hari terakhir) 44.580 orang (28 hari terakhir) 71.106 Pembaca	

Benteng, 25 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

Hj. AND DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.,M.M.
Pangkat. Penata TK. 1
NIP. 19760502 201407 2 002

Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Versi 5.0

Responden:
 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
 SELAYAR
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
 DAN PERSANDIAN

JL. JEND. A. YANI NO. 1
 92812

(0414) 21463
 kominfo@kepulauanseelayarkab.go.id
 13/01/2025

Skor Kategori SE 28 Kategori SE Tinggi

Hasil Evaluasi Akhir:

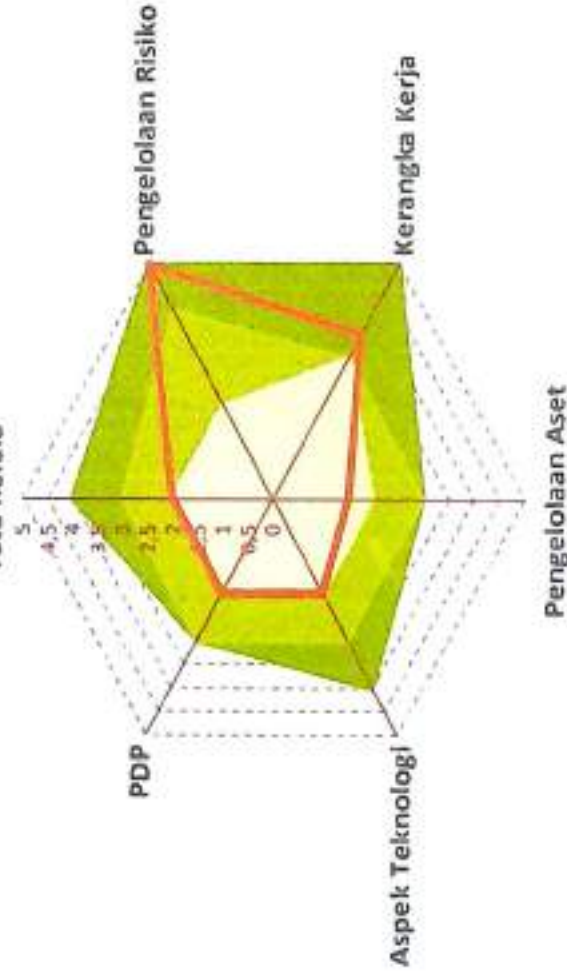
Cukup Baik

Tingkat Kelengkapan Penerapan
 Standar ISO27001 sesuai Kategori



Tata Kelola	: 65	T. Kematangan:	II	I+
Pengelolaan Risiko	: 70	T. Kematangan:	V	s/d
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	: 180	T. Kematangan:	III+	V
Pengelolaan Aset	: 147	T. Kematangan:	I+	
Teknologi dan Keamanan Informasi	: 165	T. Kematangan:	II	
Pelindungan Data Pribadi	: 57	T. Kematangan:	II	
Pengamanan Keterlibatan P. Ketiga	: 100	T. Kematangan:	II	
		%		

Tata Kelola





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK
DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

TAHUN 2024

No.	PERANGKAT DAERAH
1.	SEKRETARIAT DAERAH
2.	DPRD
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
5.	DINAS KESEHATAN
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMAN
9.	DINAS SOSIAL
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11.	DINAS PERTANIAN
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14.	DINAS PERHUBUNGAN
15.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
17.	DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
18.	DINAS PERIKANAN
19.	DINAS KEPARIWISATAAN
20.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
21.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
22.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
23.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

25.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
28.	KECAMATAN BONTOMATENE
29.	KECAMATAN BONTOMANAI
30.	KECAMATAN BUKI
31.	KECAMATAN BENTENG
32.	KECAMATAN BONTOHARU
33.	KECAMATAN BONTOSIKUYU
34.	KECAMATAN PASIMASUNGGU
35.	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR
36.	KECAMATAN PASIMARANNU
37.	KECAMATAN PASILAMBENA
38.	KECAMATAN TAKABONERATE

Benteng, 25 Januari 2025

plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E.,M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1, Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

**JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK
DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

TAHUN 2024

No.	PERANGKAT DAERAH
1.	SEKRETARIAT DAERAH
2.	DPRD
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
5.	DINAS KESEHATAN
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN
9.	DINAS SOSIAL
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11.	DINAS PERTANIAN
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14.	DINAS PERHUBUNGAN
15.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
17.	DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
18.	DINAS PERIKANAN
19.	DINAS KEPARIWISATAAN
20.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
21.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
22.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
23.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

25.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
28.	KECAMATAN BONTOMATENE
29.	KECAMATAN BONTOMANAI
30.	KECAMATAN BUKI
31.	KECAMATAN BENTENG
32.	KECAMATAN BONTOHARU
33.	KECAMATAN BONTOSIKUYU
34.	KECAMATAN PASIMASUNGGU
35.	KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR
36.	KECAMATAN PASIMARANNU
37.	KECAMATAN PASILAMBENA
38.	KECAMATAN TAKABONERATE

Benteng, 25 Januari 2025

plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian,



Hj. ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.
Pangkat. Penata Tk. I
NIP. 19760502 201407 2 002